

363. f 28
RUE
E

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN KENDAL

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S2**

**Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**ENDANG KOESTJAHANINGSIH
D4E001009**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2002**

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH
DI KABUPATEN KENDAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**ENDANG KOESTJAHANINGSIH
D4E001009**

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal

Susunan Tim Penguji

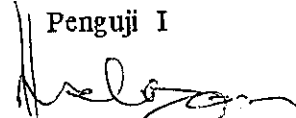
Ketua Penguji / Pembimbing I,



(Dra. Endang Larasati, MS)

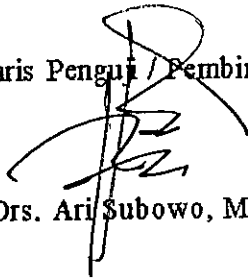
Anggota Dewan Penguji lain :

Penguji I



(Prof. Drs. Hartoyo)

Sekretaris Penguji / Pembimbing II,



(Drs. Ari Subowo, MA)

Penguji II



(Dra. Hartati P, MPA)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Sain.

Tanggal :

Ketua Program Studi MAP

Universitas Diponegoro Semarang



Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD

NIP. 130 227 811

**LEMBAR PERSETUJUAN
TESIS**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH
DI KABUPATEN KENDAL**

NAMA PENULIS : ENDANG KOESTIAHAYANINGSIH
NIM : D4E001009

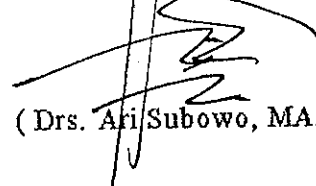
Tesis ini telah disetujui untuk diujikan :
Tanggal :

Pembimbing I



(Dra. Endang Larasati, MS)

Pembimbing II



(Drs. Ari Subowo, MA.)

RINGKASAN

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya mewujudkan tata lingkungan hidup yang bersih, indah, barokah, damai, aman dan tertib. Guna menunjang keberhasilan upaya tersebut perlu ditumbuhkan rasa tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat dan unsur aparat Pemda sendiri yang dalam hal ini penanggung jawabnya adalah Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan (KTKP).

Berdasarkan Program Kerja KTKP Tahun 2002, salah satu tugas dari seksi pada KTKP yaitu Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pemakaman adalah memelihara kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan sampah dan penyelenggaraan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir. Dengan adanya tugas tersebut diharapkan masyarakat dapat terlayani dengan baik dalam hal pembuangan sampah agar tidak pada sembarang tempat yang dapat menimbulkan bahaya karena wilayah Kendal sangat berpotensi banjir pada musim penghujan, oleh karenanya perlu tindakan antisipasi pada setiap kegiatan sehari-hari dalam membuang sampah secara benar. Untuk mewujudkan keinginan tersebut diperlukan program yang mengatur tata tertib pembuangan sampah dan penanggung jawab serta sangsinya. Adapun indikator terciptanya efektifitas program penanganan sampah diantaranya adalah komunikasi, kualitas aparat pelaksana, koordinasi yang baik, hubungan kerja, besar kecilnya sangsi dan lain-lain. Guna membatasi fokus penelitian, maka penelitian ini berusaha untuk mengkaji apakah ada hubungan antara komunikasi, kualitas aparat pelaksana dan koordinasi dengan efektifitas pelaksanaan program penanganan sampah secara langsung antara variable komunikasi dengan efektifitas program, variable kualitas aparat pelaksana dengan efektifitas program, dan antara variable koordinasi dengan efektifitas program maupun secara bersama-sama antara komunikasi, kualitas aparat pelaksana dan koordinasi dengan efektifitas program penanganan sampah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian yang diperoleh, ternyata ada hubungan yang positif dan signifikan antara variable komunikasi dengan efektifitas pelaksanaan program dengan koefisien korelasi kendall's tau sebesar 0,406 dengan tingkat signifikansi 95%. Hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas aparat pelaksana dengan efektifitas pelaksanaan program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat diterima dengan Koefisien Koreksi Kendall's sebesar 0,442. Di samping itu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variable koordinasi dengan efektifitas pelaksanaan program yang diketahui dari koefisien korelasi kendall's tau sebesar 0,381 dengan tingkat signifikansi 95%. Dilain pihak hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara komunikasi, kualitas aparat pelaksana dan koordinasi dengan efektifitas pelaksanaan program penanganan sampah dapat diterima, yang terlihat dari koefisien korelasi koordinat kendall's sebesar 0,3890 dengan tingkat signifikansi 95%.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh variabel-variabel bebas yakni variabel komunikasi, kualitas aparatur pelaksana, dan koordinasi terhadap variabel terikat, yaitu efektifitas pelaksanaan program penanganan sampah di Kabupaten Kendal.

Penelitian ini dengan populasi pegawai Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan (KTKP) Kabupaten Kendal, dan jumlah sampel sebanyak 40 orang pegawai KTKP serta menggunakan metode kuantitatif yang didukung dengan analisis diskriptif kualitatif untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat yang menggunakan taraf signifikansi 95% dimana z hitung lebih besar dari z tabel dengan harga z tabel = 1,96.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dihitung menggunakan koefisien korelasi Rank Kendall diperoleh z hitung sebagai berikut :

1. Variabel komunikasi = 3,78
2. Variabel kualitas aparat pelaksana = 4,11
3. Variabel koordinasi = 3,54

Ternyata z hitung masing-masing variabel lebih besar dari z tabel sehingga hipotesa dapat diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan masing-masing variabel bebas yakni komunikasi, kualitas aparatur pelaksana dan koordinasi terhadap variabel terikat yakni efektifitas pelaksanaan penanganan sampah sesuai dengan perumusan dan tujuan penelitian. Untuk membuktikan adanya pengaruh ketiga variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat digunakan rumus korelasi ganda dengan ketentuan x hitung lebih besar dari x tabel, dengan x tabel bernilai 7,8147 pada taraf signifikansi 95%, sedangkan x hitung sebesar 41,530 artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan ketiga variabel bebas yakni komunikasi, kualitas aparatur pelaksana dan koordinasi secara bersama-sama terhadap variabel terikat yakni efektifitas pelaksanaan penanganan sampah di Kabupaten Kendal.

Saran yang disampaikan dari hasil penelitian ini lebih disiplin dalam melaksanakan program penanganan sampah dengan lebih memperhatikan aspek pendukung pelaksanaan program baik SDM, sarana prasarana dan biaya yang dibutuhkan.

ABSTRACT

ENDANG KOESTJAHAYANINGSIH. Effectivity of Garbage Handling Implementation in Kendal Regency. Theses. Magister of Public Administration. Post Graduate Program. Diponegoro University. 2002.

This research was aimed at analysing the magnitude of relations between independent variables covering Communication, Quality of Executor Apparatus, and Coordination and Effectivity of Garbage Handling Program in Kendal regency as the dependent variable.

The population was government employees at City Planning, Cleanliness and Park Office (KTKP) of Kendal regency. Samples were 40 KTKP personnels. The research method employed quantitative method supported with descriptive qualitative analysis to prove the prescribed hypotheses which stated that there was a positive and significant relation between independent variables and dependent variable with 95% significance level, in which z table was bigger than z table at z table=1.96.

The findings show that using Rank Kendall correlation coefficient, z value for each variable are as follows: Communication is 3.78, Quality of Executor apparatus is 4.11, and Coordination is 3.54.

In fact z value of each variable is bigger than z table. Therefore the hypotheses are accepted, meaning that there are positive and significant relations between each of the independent variables with the dependent variable. It means, there are positive and significant relations between communication, quality of executor apparatus and coordination with effectivity of garbage handling program in Kendal regency, in line with the prescribed hypotheses.

To prove that there is also relation between the three independent variables altogether with the dependent variable double correlation formula was employed, with x value is prescribed bigger than x table. The finding shows that x table is 7.8147 at 95% significance level, while x value according to the statistical score is 41.530, meaning that there is a positive and significant relation between the three independent variables with the dependent variable. Therefore it is proved that there is a positive and significant relation between communication, quality of executor apparatus, and coordination altogether with effectivity of garbage handling program in Kendal regency.

Based on the result it is recommended that personnels in charge of garbage handling has to be more discipline in doing their job, while supporting aspects for program implementation such as human resource, infrastructure, facilities and the needed fund should be given more attention.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya tau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kendal, Juli 2002

(Endang Koestjahaningih)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat ridho, rahmat dan barokahNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Magister Administrasi Publik di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Endang Larasati, MS, selaku pembimbing pertama yang telah memberikan banyak arahan selama menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Drs. Ari Subowo, MA, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan koreksi-koreksi untuk perbaikan dan membimbing dengan sabar dan disiplin.
3. Bapak Bupati Kendal beserta staf yang telah membantu kelancaran penelitian ini.
4. Bapak Kepala Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal beserta staf yang telah membantu dalam menjawab kuesioner yang kami edarkan demi kelancaran tesis ini.
5. Semua rekan-rekan MAP yang telah banyak memberikan bantuan dalam berbagai bentuk demi selesainya tesis ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu dalam penyusunan tesis ini.

Dengan segala kekurangannya tesis ini kami susun. Semoga bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Kendal, Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
ABSTRAKSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	15
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	16
1. Kebijakan Publik	16
2. Efektifitas Program	24
a. Dimensi Efektifitas Program	24
b. Pengukuran Efektifitas Program	25
3. Komunikasi Program	30
a. Dimensi Komunikasi	30
b. Pengukuran Komunikasi	32
4. Kualitas Aparatur Pelaksana	36
a. Dimensi Kualitas Apartur	36
b. Pengukuran Kualitas Aparatur	38
5. Koordinasi Program	43
a. Dimensi Koordinasi Program	43

b. Pengukuran Koordinasi Program	49
B. Hipotesis	51
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	53
B. Ruang Lingkup	53
C. Lokasi Penelitian	53
D. Variabel Penelitian	54
E. Jenis dan Sumber Data	56
F. Instrumen Penelitian	57
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	58
H. Teknik Pengumpulan Data	60
I. Teknik Analisis Data	60
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HASIL PENELITIAN	
A. Hasil Penelitian	64
1. Efektifitas Program Penanganan Sampah	64
2. Komunikasi Program Penanganan Sampah	73
3. Kualitas Aparatur Pelaksana	78
4. Koodinasi Program Penanganan Sampah	83
B. Pembahasan Hasil Penelitian	87
1. Uji Validitas dan Reliabilitas	87
2. Kategorisasi Variabel Penelitian	88
a. Variabel Efektifitas Pelaksanaan Program	88
b. Komunikasi Program	89
c. Kualitas Aparatur Pelaksana	89
d. Koodinasi Program	90
3. Uji Hipotesis	91
a. Hubungan komunikasi dengan Efektifitas Pelaksanaan Program	91
b. Hubungan Kualitas Aparatur Pelaksana dengan Efektifitas Pelaksanaan Program	94

c. Hubungan Koodinasi Program dengan Efektifitas Pelaksanaan Program	96
d. Hubungan Komunikasi Kualitas Aparat dan Koordinasi dengan Efektifitas Pelaksanaan Program	99
C. Diskusi	100
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. Data Pegawai Di Lingkungan KTKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel IV.1. Aktivitas Pemda Dalam Penyuluhan Sampah	65
Tabel IV.2. Frekuensi Penyuluhan Persampahan Tahun 2001	66
Tabel IV.3. Kualitas Penyuluhan Persampahan	67
Tabel IV.4. Tingkat Pelibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah	69
Tabel IV.5. Tingkat Konflik Dalam Penanganan Sampah	70
Tabel IV.6. Pandangan Terhadap Pencapaian Sasaran Program	72
Tabel IV.7. Tingkat Kemampuan Dalam Menterjemahkan Perintah	73
Tabel IV. 8. Tingkat Hubungan Dengan Pimpinan Kerja	74
Tabel IV.9. Tingkat Keterbukaan Dalam Penyampaian Pendapat	76
Tabel IV.10. Tingkat Pelibatan Pegawai Dalam Pembuatan Keputusan	77
Tabel IV.11. Frekuensi Pengiriman Pegawai / Pelatihan	78
Tabel IV.12. Tingkat Kesesuaian Program Dengan Pelaksanaan	79
Tabel IV.13. Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Peraturan Kerja	81
Tabel IV.14. Tingkat Penerimaan Imbalan / Bonus	82
Tabel IV.15. Tingkat Kelancaran Dalam Hubungan Kerja	83
Tabel IV.16. Tingkat Penyelesaian Masalah Dalam Melaksanakan Koordinasi	84
Tabel IV.17. Frekuensi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Program	85
Tabel IV.18. Tanggapan Unit Kerja Terhadap Penanganan Sampah	86

Tabel IV.19. Kategorisasi Efektifitas Pelaksanaan Program	88
Tabel IV.20. Kategorisasi Komunikasi Program	89
Tabel IV.21. Kategorisasi Kualitas Aparatur Pelaksana	90
Tabel IV.22. Kategoriasi Koordinasi Program	91
Tabel IV.23. Hubungan Komunikasi Dengan Efektifitas Program	92
Tabel IV.24. Hubungan Komunikasi Dengan Efektifitas Program	92
Tabel IV.25. Hubungan Kualitas Aparatur Pelaksana Dengan Efektifitas Pelaksanaan Program	94
Tabel IV.26. Hubungan Kualitas Aparatur Pelaksana Dengan Efektifitas Pelaksanaan Program	95
Tabel IV.27. Hubungan Koordinasi Program Dengan Efektifitas Pelaksanaan Program	96
Tabel IV.28. Hubungan Koordinasi Program Dengan Efektifitas Pelaksanaan Program	98
Tabel IV.29. Hubungan Komunikasi, Kualitas Aparat Pelaksana dan Koordinasi Program Dengan Efektifitas Pelaksanaan Program	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan komitmen untuk merubah sistem pemerintahan sentralistik menuju sistem desentralisasi. Perubahan tersebut berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah dan penyerahan sebelas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kewenangan daerah tersebut meliputi seluruh kewenangan pemerintahan kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama. Adapun kewenangan daerah propinsi hanya terbatas pada kewenangan lintas kabupaten atau kota, kewenangan bidang tertentu yang bersifat regional, serta tugas-tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan pemerintah pusat dalam rangka pemeliharaan hubungan yang serasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah sebagai aktualisasi proses demokrasi yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten/kota, secara profesional diwujudkan dalam peraturan pembagian pemanfaatan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Manifestasi pelaksanaan otonomi daerah ini sangat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya buatan yang

aplikasinya bergantung pada kemampuan dan kesiapan daerah. Oleh karenanya diperlukan personil/aparat pemerintah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugas secara maksimal.

Berkaitan dengan hal tersebut khususnya di Kabupaten Kendal juga dituntut untuk mampu melaksanakan otonomi daerah dengan lancar. Peran strategis pelaksanaan otonomi daerah ini berada pada Bupati Kendal (sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah ada pada kepala daerah). Kemudian dalam pelaksanaannya Bupati dibantu oleh bawahannya yaitu Pimpinan Dinas, Badan, Kantor dan para staf masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kendal terdiri atas :

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Kantor.
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha.
3. Unsur pelaksana yang berjumlah tiga seksi yaitu seksi penyehatan dan seksi lingkungan dan pemukiman, seksi penataan kota dan pertamanan, dan seksi pengelolaan kebersihan dan pemakaman.

Instansi ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang penataan kota, penyehatan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

Fungsi lembaga ini antara lain :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola dan menelaah penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja ;

- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan penataan kota, penychatan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan pemakaman yang meliputi seluruh daerah ;
- c. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna menunjang kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan penataan kota, penychatan lingkungan, kebersihan pertamanan dan pemakaman.

Kebersihan lingkungan menjadi bagian penting dari program kerja Pemerintah Daerah Kendal yang berusaha menggalakkan pemeliharaan citra perkotaan yang bersih, indah dan tertib. Oleh karena itu diperlukan strategi tertentu untuk mewujudkannya dengan pertimbangan tuntutan kebutuhan umum dan nilai kebersihan kota dan kebijakan pembangunan yang memperhitungkan lingkungan hidup. Selama ini masih banyak di jumpai keluhan dari masyarakat akibat dari lingkungan yang tidak bersih di sepanjang jalan, pertamanan, pertokoan, saluran-saluran air yang mampet yang berakibat banjir pada musim penghujan, bau busuk yang menimbulkan penyakit, udara lingkungan pertokoan yang kurang segar dan ketidaknyamanan saat berjalan-jalan di sepanjang jalan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 20 Tahun 1991 yang berisikan tentang pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Kendal disebutkan jenis dan tata cara pengelolaan sampah, tugas kewajiban penghasil dan pengelola sampah, retribusi sampah dan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah serta ketentuan pidana.

Secara umum yang dimaksud dengan sampah menurut Peraturan Daerah ini adalah barang-barang yang karena keadaannya kemudian menjadi barang bekas, barang sisa dan atau terpakai lagi oleh penghasil sampah. Sedangkan sampah dihasilkan oleh penghasil sampah yaitu orang atau badan hukum yang secara

langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan timbulnya sampah atau dibuang di tempat sampah mulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah tangga, kemudian tempat penampungan sementara dan selanjutnya setelah sampah terkumpul dari berbagai tempat akan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Program penanganan sampah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman maupun petunjuk kepada masyarakat atau penduduk daerah dalam menangani hal-hal yang menyangkut penanganan sampah sebagai upaya untuk mewujudkan tata lingkungan hidup yang bersih, indah, barokah, damai, aman, dan tertib di wilayah Kabupaten Kendal.

1. Jenis dan tata cara pengelolaan sampah

Jenis sampah yang akan dibersihkan terdiri atas sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah terminal, sampah rumah makan, sampah sungai, sampah tempat usaha, sampah kantor, dan sampah umum. Khusus untuk sampah industri disini adalah sampah yang tidak termasuk limbah padat dan limbah cair. Untuk sampah kantor dan sampah umum yang bertanggung jawab mengelola sampah adalah kantor instansi pemerintah kelembagaan, tempat ibadah dilakukan oleh pimpinan unit kerja atau pimpinan lembaga peribadatan, sedangkan sampah umum pada pertunjukkan, kegiatan peribadatan, kegiatan olahraga dan upacara di tempat-tempat umum dikelola oleh penyelenggara kegiatan.

Penanganan sampah diatur dengan tata cara :

- a. Sampah dari penghasil sampah dikumpulkan dan ditampung dalam tempat sampah oleh setiap penghasil sampah. Oleh petugas pengumpul sampah, sampah-sampah tersebut diambil dan ditampung dalam tempat pembuangan sementara (TPS). Setelah dipandang cukup banyak, sampah-sampah tersebut

diangkut dengan kendaraan pengangkut sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

- b. Tanggung jawab penanganan sampah dibebankan pada pimpinan unit terkecil sampai dengan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang mengurus pembuangan sampah terakhir. Kepala desa/Kelurahan dan pimpinan dinas, perusahaan maupun unit lain mengatur pengumpulan sampah rumah tangga di wilayahnya sampai ke tempat penampungan sementara. Dari penampungan sementara sampai ke tempat pembuangan akhir menjadi tanggung jawab sepenuhnya KTKP yang dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan syarat sesuai/memenuhi syarat kesehatan lingkungan.

2. Tugas kewajiban penghasil dan pengelola sampah

Penghasil sampah wajib menjaga keserasian dan kebersihan lingkungannya dari sampah yang dihasilkan dengan cara mengumpulkan dan menampung sampah pada tempat sampah.

Berdasarkan kondisi geografis, sosial ekonomi, radius pelayanan dan volume sampah yang dihasilkan para petugas hasil sampah, dapat ditetapkan wilayah-wilayah operasional pembersih sampah yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan I adalah semua desa/kelurahan yang berada di wilayah perkotaan kecamatan.
- b. Kawasan II adalah desa/kelurahan di luar wilayah perkotaan kecamatan.

3. Retribusi sampah

Setiap penghasil sampah yang berada pada wilayah yang disebutkan di atas wajib membayar retribusi sampah yang besarnya diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk setiap kepala keluarga pada :

1). Kawasan I

Untuk keluarga golongan A sebesar Rp. 300,- setiap bulannya

Untuk keluarga golongan B sebesar Rp. 500,- setiap bulannya

2). Kawasan II

Untuk keluarga golongan A sebesar Rp. 200,- setiap bulannya

Untuk keluarga golongan B sebesar Rp. 400,- setiap bulannya

b. Pedagang dan atau penjual jasa di lingkungan pasar/terminal yang dikelola oleh Pemda :

1). Pasar kelas I sebesar Rp. 100,- per m² setiap bulan

2). Pasar kelas II sebesar Rp. 75,- per m² setiap bulan

3). Pasar kelas III sebesar Rp. 50,- per m² setiap bulan

c. Pengusaha

1). Pengusaha kios dan tempat usaha lainnya sebesar Rp. 150,- per m² setiap bulan.

2). Perkantoran, rumah makan dan hotel/losmen sebesar Rp. 200,- per m² setiap bulan.

d. Pengusaha Industri

1). Gol. A sebesar Rp. 400,- per m² setiap bulan

2). Gol. B sebesar Rp. 200,- per m² setiap bulan

3). Gol. C sebesar Rp. 50,- per m² setiap bulan

Pungutan retribusi sampah dilakukan tiap-tiap bulan yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

a. Di lingkungan desa/kelurahan dilakukan oleh Kepala desa/kelurahan dengan melibatkan RT/RW yang disetorkan pada Kantor Kecamatan paling lambat

setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Oleh Camat disetorkan pada kas daerah paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya.

- b. Di lingkungan pasar dan terminal dilakukan oleh Dinas pasar yang disetorkan kepada kas daerah setiap tanggal 10 tiap bulan.
- c. Di lingkungan industri, rumah tangga, dan tempat usaha menjadi tanggung jawab KTKP yang disetor ke kas daerah tiap tanggal 10 perbulan.

Pembebasan pembayaran retribusi berlaku bagi Kantor/Lembaga pemerintah, tempat ibadah, pertunjukkan, kegiatan peribadatan, olah raga dan upacara di tempat umum serta keluarga tidak mampu.

4. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah

Kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan kebersihan lingkungan baik di tempat-tempat umum, saluran-saluran air, jalan-jalan maupun di lingkungan perkampungan atau kelompok masyarakat yang dilaksanakan dengan gerakan kebersihan yaitu :

a. Gerakan kebersihan rutin

Di lakukan secara rutin tiap hari oleh keluarga, pengusaha/pemilik toko dan pedagang di dalam maupun di luar ruang serta kantor, asrama, rumah sakit, sekolah, tempat-tempat umum untuk menjaga kebersihan tempat masing-masing.

b. Gerakan kebersihan berkala

Merupakan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali di tempat-tempat bekerja, pasar, pabrik maupun tempat-tempat ramai.

c. Gerakan kebersihan umum

Biasanya dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian peringatan hari besar nasional dan hari-hari bersejarah dengan maksud

membersihkan bagian kota yang dipandang perlu dan rawan terhadap kebersihan/sampah yang dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

Kabupaten Kendal dengan luas wilayah 1.002,23 km², saat ini mengalami peningkatan jumlah penduduk yang semakin pesat dari tahun ke tahun diimbangi dengan laju pembangunan di semua sektor membawa konsekuensi meningkatnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Sampah ini menjadi masalah serius dan perlu penanganan tersendiri agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, sehingga perlu penanganan tersendiri untuk mencegah dan mengurangi resiko pencemaran terhadap lingkungan serta menyelamatkan sumber daya alam terutama sumber daya air dan tanah.

Untuk mengetahui tingkat keefektifitasan penanganan sampah di Kabupaten Kendal dapat dimulai dari pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dan berakhir pada pembuangan akhir. Pengumpulan sampah diartikan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari tempat sumber asal sampah ke tempat penampungan sementara. Guna menunjang keberhasilan operasi, pengumpulan sampah tersebut dikumpulkan sedemikian rupa pada tempat-tempat tertentu sehingga mudah dan cepat bagi para petugas untuk mengambilnya secara teratur dan higienis. Sedangkan pengangkutan sampah diartikan sebagai operasi yang dimulai dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir kemudian di tempat pembuangan akhir ini dilakukan proses pengolahan sampah yang baik agar tidak mencemari lingkungan.

Salah satu dari upaya perwujudan penataan kota yang sehat, bersih dan indah adalah pengelolaan sampah di lingkungan Kabupaten Kendal yang dalam prakteknya belum dapat menjawab tuntutan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

1. Lemahnya kerjasama antar pimpinan dengan bawahan;

2. Kualitas kerja pimpinan dan bawahan;
3. Rendahnya tingkat inisiatif karyawan dalam melaksanakan tugas.

Lemahnya kerjasama antara pimpinan dengan bawahannya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala unit kerja di Kabupaten Kendal masih bersifat otokrasi yaitu kepemimpinan seseorang dipandang sebagai gaya yang mendasarkan pada kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. Kenyataan ini dapat dilihat pada penempatan jabatan yang terkesan tanpa memperhatikan rambu-rambu pemerintah yang ada dan tidak berfungsinya Badan Pertimbangan Kepangkatan dan jabatan.

Penempatan pegawai pada setiap satuan kerja yang sering berpindah tempat menunjukkan otoritas pimpinan yang terlalu mutlak sehingga kurang mendapat simpati dari unit organisasi. Bahkan banyak yang mengeluh mendapatkan staf yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak memiliki kemampuan sesuai bidang tugasnya.

Kemampuan pegawai antara lain bisa dilihat dari sudut pendidikannya. Para pegawai pada Kantor Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan (KTKP) mayoritas adalah SLTA, seperti nampak pada tabel berikut :

TABEL I
DATA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KTKP
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	S-2	1 Orang	4,76 %
2	S-1	2 Orang	9,52 %
3	D-3	2 Orang	9,52 %
4	SLTA	13 Orang	61,90 %
5	SLTP	1 Orang	4,76 %
6	SD	2 Orang	9,52 %
	Jumlah	21 Orang	100 %

Sumber : Bagian Kepegawaian Kabupaten Kendal, Januari 2001.

Untuk menunjang penyelesaian tugas, mungkin pegawai ini dapat diberikan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan bidangnya pada setiap periode tertentu secara bergilir ataupun mengikut sertakan pegawai pada kursus-kursus ketrampilan yang diselenggarakan oleh unit-unit pemerintah yang bergerak dalam sanitasi lingkungan.

Inisiatif pegawai yang masih rendah nampak dari fakta bahwa pada umumnya mereka bekerja dengan menunggu perintah. Selain itu sarana dan prasarana yang masih minim juga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan penanganan sampah di lapangan. Sebagai gambaran dapat penulis sebutkan bahwa sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional yang dimiliki KTKP berupa satu buah mobil Panther, dua buah mobil Kijang Pick Up, satu buah mobil Espass Pick Up, satu buah truck tangki air, tujuh buah drum truck, dan satu buah Buldozer serta 17 buah container penampungan sampah. Adapun luas wilayah Kabupaten Kendal yang kurang lebih 1.002,23 km² tersebar pada 17 Kecamatan yang jarak satu dengan yang lain cukup jauh. Keterbatasan sarana ini menjadikan alasan pegawai malas untuk melaksanakan tugas pengangkutan sampah dari satu tempat ke tempat lain karena jarak yang terlalu jauh dan jumlah kotoran yang dihasilkan rata-rata 200 m³ dalam sehari.

Program kerja instansi yang setiap tahun selalu diperbaiki mulai dari penyusunan rencana kegiatan hingga pelaksanaan kebersihan belum juga mampu menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kendal. Setiap tahun anggaran baru Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan (KTKP) berusaha meningkatkan jumlah usulan anggaran untuk peningkatan pengelolaan sampah pada wilayah yang belum mendapat jatah pengelolaan kebersihan. Lewat berbagai pendekatan kepada pihak yang terkait, KTKP menyampaikan berbagai alasan akan pentingnya pengelolaan sampah agar

tidak menimbulkan masalah baru seperti datangnya wabah penyakit. Oleh karenanya itu pada setiap kegiatan yang melibatkan keberadaan KTKP selalu diinformasikan pentingnya mengelola sampah dengan baik.

Faktor komunikasi yang mungkin kurang lancar antara penanggung jawab program kebersihan dengan para petugas di lapangan dalam setiap kegiatan yang menyangkut kebersihan khususnya penanganan sampah menyebabkan kurangnya minat dan perhatian masyarakat serta unit organisasi terkait berpartisipasi pada program penanganan sampah tersebut. Hal itu bisa dibuktikan dengan masih banyak petugas/pegawai yang tidak mengetahui secara keseluruhan tugas-tugas pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawabnya seperti sering terjadi pengambilan sampah pada satu tempat yang tidak tuntas, karena umumnya mereka (individu) hanya memusatkan perhatian pada pekerjaan yang hanya menjadi bagian dari tugasnya sedangkan secara keseluruhan tidak berfikir olehnya bahwa pekerjaan penanganan sampah adalah tanggung jawab seluruh instansi KTKP. Akibatnya masih banyak di antara petugas saling melempar tanggung jawab dalam pemeliharaan kebersihan dan penanganan sampah baik secara administratif maupun di lapangan.

Tidak lancarnya komunikasi ini menunjukkan masih lemahnya sumber daya manusia dalam penyampaian maupun penerimaan informasi kepada pihak lain, sehingga komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik. SDM dalam hal ini aparat Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal yang sangat terbatas jumlahnya belum mampu menjabarkan kegiatan penanganan sampah sebagaimana yang diharapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomer 20 Tahun 1991. Sekalipun sangat disadari keterbatasan dana yang disediakan untuk operasional penanganan sampah, namun masih banyak petugas yang kurang dapat memanfaatkan apa yang ada semaksimal mungkin. Hanya pada wilayah-wilayah

tertentu saja, misalnya : Kecamatan Weleri dan Kecamatan Kaliwungu yang menjadi tumpuan perhatian utama mereka. Hal ini menunjukkan masih rendahnya motivasi para pegawai dalam tugas penanganan sampah.

Partisipasi aparat dalam program penanganan sampah dituntut untuk dapat mensukseskan keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal mewujudkan Kendal yang bersih. Keinginan ini merupakan niat mulia agar masyarakat terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh ketidak beresan pengelolaan sampah seperti banjir dan wabah penyakit. Untuk mewujudkannya KTKP tentu saja tidak dapat berjalan sendiri tetapi memerlukan unit organisasi lain sebagai partner dalam pelaksanaan tugas penanganan sampah seperti Dinas Kesehatan, pihak Kecamatan, Kelurahan dan Dinas-dinas lain yang berpotensi sebagai penghasil sampah (DLAJR, Kantor Pengelolaan Pasar, RSUD, BUMN, DPU).

Keadaan ini menuntut kemampuan aparat KTKP untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan penanganan sampah secara kontinyu. Selama ini kemungkinan besar KTKP jarang mengadakan rapat/pertemuan dengan unit lain untuk membicarakan penanganan sampah dengan cara yang paling efektif dan efisien sehingga frekuensi penanganan sampah rendah. Ini menunjukkan koordinasi masih relatif kurang baik, padahal koordinasi dengan unit lain sebagai modal untuk mendapatkan wilayah yang bersih dari sampah-sampah yang dihasilkan oleh penghasil sampah sangat dibutuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomer 20 Tahun 1991.

Dalam Program Kerja Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal Tahun 2002 dinyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan kebersihan yang masih dihadapkan pada hal-hal yang tidak efisien, terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kebersihan dan pertamanan, Sumber Daya Manusia

yang kurang profesional dan terbatasnya sarana mobilitas operasional pertamanan dan pengangkutan sampah telah menimbulkan citra buruk dan krisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap penanganan kebersihan.

Dengan melihat rendahnya penanganan kebersihan di lingkungan Kabupaten Kendal yang disebabkan oleh banyak faktor yang telah disebutkan di atas, maka penulis membatasi faktor-faktor tersebut dengan mengambil judul "Efektifitas Pelaksanaan Penanganan Sampah di Kabupaten Kendal".

B. PERUMUSAN MASALAH

Masalah dalam penelitian ini akan penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap program penanganan sampah di lingkungan Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana pengaruh kualitas aparatur pelaksana terhadap program penanganan sampah di lingkungan Kabupaten Kendal ?
3. Bagaimana pengaruh koordinasi terhadap program penanganan sampah di lingkungan Kabupaten Kendal ?
4. Bagaimana pengaruh komunikasi, kualitas aparatur pelaksana dan koordinasi terhadap program penanganan sampah di lingkungan Kabupaten Kendal ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian evaluasi seperti halnya penelitian ini paling tidak mempunyai dua macam tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus (Michael H. Walizer, 1987 : 59). Tujuan umum dari penelitian evaluasi adalah untuk mengkaji rangkaian kejadian/peristiwa. Rangkaian kejadian tersebut berasal dari sebuah program, yang dari program tersebut diharapkan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu untuk dapat dinilai berhasil suatu program

haruslah mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang dirancang sesuai dengan sasarannya dan untuk menjaga kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi, yaitu :

1. Implementasi program berbeda dari yang ada dalam rancangan program.
2. Meskipun suatu program dilaksanakan dengan benar sesuai dengan rancangan, kemungkinan bisa saja program itu tidak mengarah pada kegiatan-kegiatan yang seharusnya menjadi sasarannya.
3. Sekalipun kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan, mungkin saja kegiatan-kegiatan tersebut mendatangkan hasil yang berlainan dari yang diharapkan.

Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian evaluasi adalah untuk menentukan tingkat efektifitas suatu program dan menentukan seberapa efisienkah suatu program dibandingkan dengan program serupa yang lain.

Tujuan-tujuan tersebut nampaknya sederhana tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Kesulitan yang timbul dari tujuan umum adalah tidak mudah menentukan untuk apa program itu, dan bagaimana akan menilai suatu program efektif atau tidak. Sedangkan kesulitan tujuan khusus adalah program-program tersebut seringkali memiliki beberapa tujuan dan tidak dirumuskan secara eksplisit.

Sebagai satu penelitian evaluasi, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya hubungan antara komunikasi dengan program penanganan sampah di lingkungan Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya hubungan antara kualitas aparatur pelaksana dengan program penanganan sampah di lingkungan Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya hubungan antara koordinasi dengan program penanganan sampah di lingkungan Kabupaten Kendal.

4. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya hubungan antara komunikasi, kualitas aparatur pelaksana dan koordinasi secara bersama-sama dengan program penanganan sampah di lingkungan Kabupaten Kendal.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kabupaten Kendal, hal ini merupakan masukan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan penanganan sampah di Kabupaten Kendal ;
2. Bagi masyarakat, merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran kedisiplinan akan arti kebersihan bagi lingkungannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Dalam berbagai literatur baik dari ilmu politik maupun ilmu administrasi negara, para pakar memberikan definisi kebijakan publik secara berbeda satu dengan yang lain. Hal ini logis karena para ahli biasanya dipengaruhi oleh karakteristik masalah yang ingin ditelaahnya ataupun perbedaan pendekatan dan metode penelitian yang dipengaruhi. Heinz Eanlau dan Kenneth Previtt (Jones, 1991 : 47) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Kemudian James Anderson merumuskan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaksana atau sekelompok pelaksana guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 1992 : 17). Hal ini berarti kebijakan publik memiliki makna tentang suatu pilihan tindakan yang diambil oleh pemerintah yang memuat tentang beberapa aturan main yang melibatkan pemerintah maupun masyarakat serta dipakai untuk menjawab tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat baik oleh individu, kelompok maupun organisasi. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa suatu kebijakan merupakan sebuah aturan yang bersifat normatif dan menuntut adanya ketaatan baik dari pembuat kebijakan (aparatur pemerintah) maupun dari mereka yang menjadi objek kebijakan tersebut.

Dalam kerangka demikian maka hakekat suatu kebijakan tidak hanya bersifat ketentuan yang harus dipatuhi oleh objek kebijakan, tetapi juga diperlukan adanya konsistensi kepatuhan seluruh pihak yang terkait.

Selanjutnya Anderson (dalam Sunggono, 1994 : 144) mengemukakan alasan masyarakat mau mematuhi kebijakan, antara lain disebabkan oleh :

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan kepatuhan badan-badan pemerintah.
- b. Ada kesadaran untuk menerima kebijakan.
- c. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan karena kebijakan ini lebih bermanfaat untuk kepentingan pribadi mereka.
- d. Adanya sangsi-sangsi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.
- e. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya.

Sedangkan kebijakan yang memiliki orientasi pada kepentingan publik memiliki pengertian yang lebih terkait dengan produk pemerintah. Menurut Thomas R. Dye (1978 : 3) kebijakan publik diartikan sebagai "Whatever governments choose to do or not to do" (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objektifnya) dan kebijakan pemerintah itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah saja.

Di samping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintahpun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan oleh sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu pilihan dari kebijakan negara (Islamy, 1992 : 18). Secara khusus Chief J.O. Udoji (dalam Abdul Wahab, 1991 : 15) mendefinisikan kebijakan-kebijakan publik sebagai tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang dipusatkan pada suatu masalah atau kelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan dengan sebagian besar warga masyarakat. Mengacu pada apa yang disampaikan di atas, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang memuat tentang beberapa aturan main yang melibatkan pemerintah maupun masyarakat dan untuk menjawab tantangan-tantangan serta tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat, baik oleh individu, kelompok maupun organisasi.

Berkaitan dengan terminologi kebijakan publik tersebut di atas, yang menjadi kajian penelitian dalam tesis ini adalah kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Kendal.

Sekalipun kebijakan publik telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu tetapi tidak selalu tujuan tersebut tercapai disebabkan oleh lemahnya daya antisipasi para pembuat kebijakan maupun pendesain program dan proyek, terganggunya implementasi (pelaksana) yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan, atau mungkin juga karena pengaruh kondisi lingkungan yang terabaikan sebelumnya (Wibawa, 1994). Oleh karena itu pemerintah selaku pembuat kebijakan sangatlah mengharapkan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Untuk itu pemerintah berkepentingan untuk menjaga proses pelaksanaan kebijakan sebaik mungkin. Dalam kegiatan

analisa suatu kebijakan publik, seorang analis paling tidak akan dihadapkan pada tiga aspek, yaitu :

- 1). Analisis mengenai perumusan kebijakan.
- 2). Analisis mengenai pelaksanaan (implementasi).
- 3). Analisis mengenai penilaian (evaluasi) kebijakan.

Sebagai salah satu aktifitas fungsional, penilaian kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya yaitu pengesahan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan sehingga penilaian dapat mencakup isu kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Jadi penilaian kebijakan dilakukan pada fase perumusan masalah, formulasi usulan kebijakan, implementasi, legitimasi dan seterusnya (Islamy, 1992 : 112). Menurut Charles O. Jones (dalam Islamy, 1992 : 113) penilaian kebijakan diartikan sebagai "suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya".

Lebih lanjut Rossi, dkk menspesifikasikan pertanyaan masing-masing tipe evaluasi sebagai berikut :

- 1). Pemantauan.

Apakah program atau kebijakan telah mencapai orang-orang, rumah tangga atau unit-unit sasaran lainnya seperti yang ditujukan oleh program tersebut ?
Apakah program atau kebijakan tersebut menyediakan sumber daya, pelayanan dan manfaat atau kesempatan yang dipengaruhi oleh program atau kebijakan ?

2). Penilaian dampak.

Apakah program atau kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan ?

Dapatkah hasil-hasil dari program atau kebijakan tersebut dijelaskan oleh beberapa proses di lingkungan kebijakan ?

Apakah program atau kebijakan memiliki dampak yang tidak diinginkan ?

3). Efisiensi Ekonomi atau Efektifitas Biaya.

Berapa besar biaya yang dibutuhkan para partisipan kebijakan ?

Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Michael Born (dalam Dwiyanto, 1994) yang membedakan evaluasi kebijakan menjadi tiga kategori. Pertama, evaluasi proses yang memusatkan perhatian pada pertanyaan bagaimana program dilaksanakan. Kedua, evaluasi dampak yang menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah dicapai dari program. Ketiga, evaluasi strategi yang mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana program dapat dilaksanakan secara efektif untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat dibanding dengan program lain yang ditujukan pada masalah yang sama dengan topik kebijakan.

Menurut Singarimbun dan Soffian Efendi (1985 : 6) yang menjadi pertanyaan pokok dalam penelitian evaluasi sampai seberapa jauh tujuan yang digariskan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai. Penelitian evaluasi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis sebagai berikut : Apa yang merupakan masalah pokok dari suatu masyarakat, apa program yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah itu, bagaimana program itu dapat dilaksanakan, apakah program dilaksanakan sebagaimana direncanakan, dan apakah tujuan tercapai.

Selanjutnya Ripley (1985 : 143, 165, 174) menganjurkan beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi yaitu :

- 1) Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses didalam pembuatan kebijakan ?
- 2) Apakah proses pembuatan kebijakan cukup rinci, terbuka dan memenuhi prosedur ?
- 3) Apakah program didesain secara logis ?
- 4) Apakah sumber daya yang menjadi input program telah cukup memadai untuk mencapai tujuan ?
- 5) Apakah standar implementasi yang baik menurut kebijakan publik ?
- 6) Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan ekonomi ? Apakah uang digunakan dengan jujur dan tepat ?
- 7) Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan sesuai desain program ?
- 8) Apakah program memberikan dampak kepada kelompok lain ? Apa jenis dampaknya ?
- 9) Apa dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan terhadap masyarakat ?
- 10) Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat ?
- 11) Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan ?

Sementara itu Kisley dan Kuma (dalam Wibawa dkk, 1994 : 1) mengajukan tiga pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output proyek ?
- 2) Bagaimana mereka bereaksi terhadap proyek tersebut ?
- 3) Bagaimana proyek tersebut mempengaruhi perilaku mereka ?

Dari berbagai persoalan tersebut, evaluasi kebijakan kiranya bermaksud untuk mengetahui empat aspek yaitu :

- 1) Proses pembuatan kebijakan.
- 2) Proses implementasi.
- 3) Konsekuensi kebijakan.
- 4) Efektifitas dampak kebijakan.

Selanjutnya evaluasi terhadap aspek kedua disebut evaluasi implementasi, sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan. Lebih lanjut Meter dan Horns (dalam Wibawa dkk, 1994 : 15) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan didalam kebijakan. Sedangkan Grindle (1980 : 20) berpendapat bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari seluruh proses kebijakan. Meter dan Horn (dalam Wibawa dkk, 1994 : 21) menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya, tetapi terjadi setelah proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati.

Studi implementasi kebijakan lebih menekankan pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian

sasaran kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (1983 : 45) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi sesudah atau sebelum program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kegiatan-kegiatan yang telah disahkan secara administratif ataupun yang menimbulkan dampak nyata pada masyarakat secara administratif ataupun yang menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Berdasarkan pandangan para ahli dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok atau sasaran melainkan menyangkut pula jaringan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku semua yang terlibat dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan atau tidak diharapkan. Disisi lain ada pemahaman tentang implementasi dimulai sejalan berlangsungnya tahap penyusunan program. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983 : 50) diperlukan tiga langkah yaitu :

- 1). Identifikasi masalah yang harus diintervensi.
- 2). Menegaskan tujuan yang hendak dicapai.
- 3). Merancang struktur proses implementasi.

Kejelasan program sangat diperlukan karena hanya dengan itulah kriteria untuk memeriksa dan mengevaluasi tindakan administratif yang dilakukan oleh birokrasi guna menstranformasikan kebijakan menjadi kegiatan nyata (Grindle, 1980 : 70).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi terhadap kebijakan publik mencakup tiga aspek yaitu :

- 1). Perumusan kebijakan dimana analis berusaha mencapai jawaban bagaimana kebijakan itu dirumuskan, siapa yang paling berperan dan untuk siapa kebijakan itu dibuat.
- 2). Implementasi kebijakan, dimana analis berusaha untuk mencapai jawaban bagaimana kebijakan dilaksanakan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan itu.
- 3). Dampak yaitu usaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindak kebijakan, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dalam penelitian ini efektifitas kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Kendal akan memfokuskan pada aspek ketiga yaitu evaluasi dampak dari suatu kebijakan dengan tidak mengabaikan aspek implementasinya. Hal ini sesuai dengan penegasan Dwiyanto (1994 : 25) sebagai berikut :

“ Studi evaluasi bisa mencakup proses (implementasi / pelaksanaan) ataupun dampak. Setiap kebijakan pemerintah selalu menghasilkan dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan, baik yang menguntungkan atau yang merugikan. Semua jenis dampak itu menjadi aspek dari evaluasi lebih dari itu studi evaluasi juga dilakukan untuk mengkaji komponen-komponen dan instrumen-instrumen kebijakan yang memiliki kontribusi terhadap munculnya berbagai dampak kebijakan itu “.

2. Efektifitas Program

a. Dimensi Efektifitas Program

Menurut A. Emerson dalam Handyaningrat (1984 : 16) efektifitas diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya Steers (1980 : 60) mengartikan efektifitas sampai sejauh mana organisasi melakukan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya. Steers berpendapat bahwa keberhasilan

organisasi dinilai dari konsep efektifitas. Efektifitas pekerjaan pemerintah dikatakan berhasil apabila suatu tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana atau efektif tetapi belum tentu efisien.

Jadi titik berat efektifitas program berada pada keberhasilan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan Steers lebih dalam menjelaskan makna dari efektifitas program yaitu bila seluruh pelaksanaan tugas pokok organisasi mencapai tujuan dengan prosedur yang telah ditentukan dengan hasil yang dapat dilihat sesuai dengan rencana sebelumnya.

Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa efektifitas program penanganan sampah adalah pelaksanaan program penanganan sampah yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasilnya menunjukkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Pengukuran Efektifitas Program

Mengukur efektifitas program kebijakan oleh para ahli ada yang dilakukan dari tujuan, prosedur maupun hasil yang terpenuhi dengan baik atau tidak. Kemudian sebagian lagi dari derajat efektifitas produksi atau dengan ukuran waktu yang diperlukan untuk menghasilkan beberapa kemungkinan. Semakin pendek waktu yang dilalui untuk menghasilkan kemajuan, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Ini tergantung sejauhmana sumberdaya dan personil yang disediakan oleh sistem kebijakan yang memiliki jumlah dan kualitas yang memadai. Sedangkan efektifitas program ditentukan oleh sifat dan isi dari kebijakan itu sendiri. Artinya bahwa beberapa kebijakan itu mudah diimplementasikan, bahkan ada yang terimplementasi dengan sendirinya tanpa melalui serangkaian kegiatan pelaksanaan, akan tetapi

banyak keputusan kebijakan yang memerlukan proses implementasi yang rumit dan sulit terlaksana.

Untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi ada tiga cara yang perlu diketahui :

- 1). Dari tingkat kepatuhan (compliance) pada bagian birokrasi terhadap birokrasi superior.
- 2). Lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.
- 3). Implementasinya mengacu dan mengarah pada apa yang dikehendaki dari semua program yang ada.

Menurut Meter dan Horn (dalam Wibawa, 1994 : 19) suatu kebijakan tentunya memiliki standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kejelasan standar dan tujuan tidak menjamin implementasinya akan efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktifitas penyuluhan. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggungjawab mereka.

Meter dan Horn (dalam Wibawa, 1994 : 22) juga mengatakan bahwa organisasi pelaksana memiliki enam variabel yang semuanya harus dicermati oleh seorang evaluator, yaitu :

- a). Kompetensi dari jumlah staf.
- b). Rentang dan derajat pengendalian.
- c). Dukungan politik yang dimiliki.
- d). Kekuatan organisasi.
- e). Derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi.
- f). Keterkaitan dengan pembuat kebijakan.

Dari pendapat Meter dan Horn di atas, dapat penulis jelaskan bahwa untuk mencapai efektifitas program diperlukan kejelasan standar dan tujuan serta kemampuan mengkomunikasikan program kepada pelaksana program tersebut.

Dikaitkan dengan program penanganan sampah ini, ukuran akan efektifitas program penanganan sampah dapat dilihat dari pencapaian tujuan dari program tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 20 Tahun 1991. Aparat yang memiliki kemampuan memahami program penanganan sampah dan tujuannya dengan jelas, dan dapat mengkomunikasikan program tersebut dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam KTKP akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

Sebaliknya bila ditemui aparat KTKP tidak/kurang mampu memahami maksud dari program penanganan sampah dan tujuannya, maka akan sulit melaksanakan program tersebut sesuai dengan rencana dan semakin sulit merealisasikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian Sabatier dan Mazmanian (1983 : 52) dalam hal ini menyatakan tiga variabel yang berfungsi pada efektif tidaknya suatu program yaitu :

a). Variabel karakteristik masalah, yang meliputi :

- (1). Ketersediaan teknologi dan teori teknis.
- (2). Keragaman perilaku kelompok sasaran.
- (3). Sifat populasi.
- (4). Derajat perubahan perilaku yang diharapkan.

b). Variabel struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan yang meliputi :

- (1). Kejelasan atau konsistensi tujuan atau sasaran.
- (2). Teori kausal yang memadai.
- (3). Integrasi organisasi pelaksana.
- (4). Rekrutmen dan pejabat pelaksana.
- (5). Akses formal pelaksana ke organisasi lain.

c). Variabel di luar program, yang meliputi :

- (1). Kondisi sosial ekonomi dan teknologi.
- (2). Perhatian pers terhadap masalah kebijakan.
- (3). Dukungan politik.
- (4). Sikap dan sumberdaya sasaran.
- (5). Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Penelitian tersebut berdasarkan pada anggapan bahwa suatu program akan efektif apabila aparat pelaksana mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan. Dengan asumsi tersebut maka tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena ini merupakan standar evaluasi dan sasaran yang legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumber dayanya.

Selanjutnya menurut Anderson (dalam Islamy, 1992 : 79) dampak kebijakan publik yang diwujudkan dalam program memiliki beberapa dimensi yaitu :

a). Dampak kebijakan yang diharapkan atau tidak diharapkan baik pada problema maupun pada masyarakatnya.

- b). Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut, biasanya disebut externalities.
- c). Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
- d). Dampak kebijakan terhadap biaya langsung atau direct cost dari kebijakan pemerintah dan dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (indirect cost) sebagaimana yang dialami oleh organisasi-organisasi masyarakat.

Di sini Anderson menjelaskan bahwa penekanan hasil suatu program baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan dari pencapaian tujuan yang berakibat pada pembiayaan yang berpengaruh pada kondisi sekarang maupun kondisi yang akan datang.

Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi yang dituangkan dalam sebuah program kegiatan, maka salah satu faktor yang sangat menentukan adalah berjalannya program yang ditetapkan sesuai dengan prosedur yang ditentukan untuk mencapai tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini mendasarkan pada teori A. Emerson dalam mengukur sejauh mana pelaksanaan program penanganan sampah di Kabupaten Kendal dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria antara lain tingkat kejelasan program, tujuan yang ditetapkan dan tingkat keberhasilan program.

3. Komunikasi Program

a. Dimensi Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan suatu program kebijakan, baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Dengan komunikasi pemerintah dapat menyampaikan informasi, aspirasi serta program-program yang akan dilakukan agar dapat diterima oleh masyarakat. Pengertian komunikasi secara demikian dikemukakan oleh M.C. Farland (1981 : 94) sebagai berikut “Komunikasi adalah proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain antar manusia”. Dari pernyataan ini dapat dilihat proses interaksi atau hubungan satu sama lain dapat dimengerti dengan maksud agar dapat diterima sasarannya. Jadi komunikasi mempunyai tujuan untuk mempengaruhi orang lain agar tujuan dan sasaran dari pemerintah dapat dimengerti dan diterima oleh orang lain secara benar sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan salah penafsiran.

Dalam sejarah administrasi dan manajemen, pada awal mulanya ilmu ini sedikit sekali memberikan perhatian pada komunikasi. Walaupun komunikasi secara implisit termasuk fungsi manajemen pemberian perintah dan prinsip struktur hirarki, pada awal mulanya para ahli administrasi dan manajemen tidak pernah berusaha mengembangkannya secara penuh atau mengintegrasikan ke dalam teori manajemen. Orang yang pertama kali menganalisa komunikasi agak detail dengan melengkapi cara memecahkan persoalan komunikasi yang bermakna adalah Henri Fayol. Konsepsi “jembatan Fayol” terkenal untuk mengatasi hambatan komunikasi formal dalam suatu organisasi (Thoha, 1992 : 50).

Usaha berikutnya yang dilakukan oleh Chester Barnard di akhir tahun 1930 amat bermanfaat untuk mengembangkan komunikasi sebagai suatu dinamika yang penting dalam ilmu perilaku organisasi. Dia percaya bahwa komunikasi merupakan kekuatan utama dalam membentuk organisasi. Ada tiga unsur pokok organisasi, salah satunya ialah komunikasi, yang lain ialah tujuan organisasi dan kemauan. Baginya komunikasi membuat dinamis suatu sistem kerja sama dalam organisasi dan menghubungkan tujuan organisasi pada partisipasi orang-orang yang ada didalamnya. Barnard juga menjalinkan konsep komunikasi dengan konsep otoritasnya. Dia menekankan bahwa pengertian dan pemahaman harus terjadi sebelum otoritas itu dapat dikomunikasi oleh atasan kepada bawahan. Dia mendaftar tujuh faktor komunikasi yang berperan dalam menciptakan dan memelihara otoritas yang obyektif dalam organisasi. Tujuh faktor itu secara singkat dapat dikutip sebagai berikut (Thoha, 1992 : 60) :

- 1). Saluran komunikasi itu harus diketahui secara pasti.
- 2). Seyogyanya harus ada saluran komunikasi formal pada setiap anggota organisasi.
- 3). Jalur komunikasi itu seharusnya langsung dan sependek mungkin.
- 4). Garis komunikasi formal seluruhnya hendaknya dipergunakan secara formal.
- 5). Orang-orang yang bekerja sebagai pusat pengatur komunikasi haruslah orang-orang yang cakap.
- 6). Garis komunikasi seharusnya tidak mendapat gangguan sementara organisasi sedang berfungsi.
- 7). Setiap komunikasi haruslah disahkan.

Istilah komunikasi sendiri secara bebas dipergunakan oleh setiap orang dalam masyarakat ini, termasuk di dalamnya ahli-ahli perilaku organisasi. Menurut Webster (Thoha, 1992 : 70), istilah komunikasi berasal dari istilah latin *communicare*, dan *communicatus* yang artinya suatu alat untuk berkomunikasi terutama suatu system penyampaian dan penerimaan berita, seperti misalnya telepon, telegraf, dan lain sebagainya. Selain itu komunikasi ialah suatu proses penyampaian, atau pemberitahuan dan penerimaan suatu keterangan, tanda atau kabar lewat pembicaraan, gerakan, tulisan dan lain-lainnya. Menurut Cartier dan Harwood komunikasi itu adalah proses pengulangan ingatan-ingatan (Thoha, 1992 : 65).

Dari rumusan-rumusan komunikasi tersebut, hampir semuanya menekankan adanya penggunaan simbol-simbol untuk mentransfer pengertian dari suatu informasi. Selanjutnya menurut perilaku organisasi komunikasi adalah suatu proses antar orang atau antar pribadi yang melibatkan suatu usaha untuk mengubah perilaku. Perilaku yang terjadi dalam suatu organisasi adalah merupakan pokok dalam proses komunikasi.

b. Pengukuran Komunikasi

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa guna mengetahui komunikasi dalam fokus penelitian ini, maka pengukuran seberapa jauh komunikasi tersebut diperlukan dalam sebuah program, diperlukan kejelasan informasi dan pedoman komunikasi yang baik.

Telah banyak diketahui bahwa komunikasi itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada tiga faktor yang mempengaruhi informasi, yaitu kelebihan informasi, pengertian dan *feedback*. Kelebihan informasi

merupakan suatu keadaan bahwa besarnya jumlah informasi yang diterima akan banyak mempengaruhi jalannya informasi. Menurut Miller (Thoha, 1992 : 75), ada tujuh reaksi terhadap kelebihan muatan informasi, yakni :

- 1). Orang-orang akan gagal dalam memperhitungkan informasi. Pola ini terjadi ketika seseorang sampai terlalu sibuk dengan banyak kegiatan-kegiatan, sehingga hasilnya ia lupa atau tidak mampu menangkap suatu informasi yang datang kepadanya. Akibatnya ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sebaik mungkin.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka kelebihan informasi atau tidaknya para pegawai KTKP dapat dilihat dari sering tidaknya para pegawai KTKP menumpuk pekerjaan atau tidak. Jika sering menunda pekerjaan atau pekerjaan para pegawai KTKP tidak terselesaikan menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi tidak efektif.

- 2). Pola reaksi kedua ialah banyak membuat kesalahan. Oleh karena terlampau banyak informasi yang diterima, maka seseorang acapkali membuat kesalahan di dalam menyelesaikan pekerjaan. Instruksi yang datang silih berganti kepada bawahan, bukannya akan membuat bawahan lebih cakap dan ahli menyelesaikan tugas pekerjaan, melainkan akan membuat bingung dan banyak kesalahan.

Dikaitkan dengan penelitian, efektif tidaknya komunikasi yang terjadi dalam organisasi KTKP dapat dilihat dari sering tidaknya para anggota organisasi KTKP berbuat kesalahan di dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya.

- 3). Reaksi ketiga ialah menunda atau menumpuk pekerjaan. Ini merupakan reaksi yang umum dan banyak orang melakukannya. Dengan demikian

banyak informasi yang datang, membuat semua laporan kerja tidak bisa berjalan efektif dan lancar.

- 4). Reaksi keempat adalah penyaringan. Dalam hal ini informasi yang datang disaring, dihilangkan, ditajamkan, dan atau diabaikan. Karena beban informasi yang datang terlalu besar, orang cenderung melakukan hal-hal tersebut. Dalam hal ini seseorang menentukan prioritas di antara hal-hal yang cenderung mempunyai kesamaan. Penentuan prioritas setelah datangnya informasi merupakan proses penyaringan, hasilnya bisa mengabaikan informasi, menghilangkan atau justru membuat lebih tajam.
- 5). Reaksi kelima ialah seseorang cenderung menangkap informasi pada garis besarnya saja. Keterangan yang terperinci tidak menarik perhatiannya.
- 6). Reaksi keenam adalah menugaskan atau melemparkan tugas kepada orang lain untuk menghadapi kelebihan informasi ini. Pola reaksi ini biasanya dipergunakan oleh pimpinan yang sibuk dan mempunyai banyak pembantu atau pimpinan yang malas tidak mau menangani persoalan sendiri selalu menugaskan pada stafnya, atau juga dapat dipergunakan oleh pimpinan yang baik hati mau mendidik bawahannya dengan delegasi wewenang pada bawahannya.
- 7). Reaksi ketujuh ialah kesengajaan untuk menghindari informasi yang datang. Pola reaksi informasi yang datang kepadanya berupa tugas-tugas yang harus segera diselesaikan, tetapi masih juga datang tugas-tugas atau informasi lainnya.

Sifat informasi yang datang juga sangat dipengaruhi oleh pengertian dan pemahaman penerima informasi. Dengan demikian informasi yang disampaikan oleh seseorang sebagai sumber informasi kepada orang lain

sebagai penerima informasi, pengertiannya tidak semata-mata ditentukan oleh sumber informasi saja. Pengertian dari kedua pihak sangat menentukan terjadinya hakekat informasi tersebut.

Kemudian untuk menghasilkan informasi yang maksimal diperlukan pedoman komunikasi yang baik. *American Management Associations (AMA)* telah menyusun sejumlah prinsip komunikasi yang disebut "*the Ten Commandments of Good Communication*" (Sepuluh pedoman komunikasi yang baik). Prinsip komunikasi tersebut antara lain (Hani Handoko, 1994 : 290) :

- 1). Cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan.
- 2). Teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi.
- 3). Pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan.
- 4). Konsultasi dengan pihak-pihak lain, bila perlu, dalam perencanaan komunikasi.
- 5). Perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi.
- 6). Ambil kesempatan, bila timbul, untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik.
- 7). Ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan.
- 8). Perhatikan konsistensi komunikasi.
- 9). Tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi.
- 10). Jadilah pendengar yang baik, berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti tetapi untuk mengerti.

Dari berbagai teori tentang komunikasi di atas, maka penulis mencoba untuk mengkaji komunikasi yang dianggap sesuai dengan kondisi di lingkungan KTKP Kabupaten Kendal dengan menggunakan teori M.C. Farland (1981 : 94), bahwa elemen yang menentukan komunikasi berhasil atau tidak adalah proses interaksi saling pengertian satu sama lain antar manusia dalam memahami informasi.

4. Kualitas Aparatur

a. Dimensi Kualitas Aparatur

Menurut Ismadi (1997), kualitas merupakan pengertian abstrak yang berkaitan dengan atribut-atribut tertentu dan standar-standar tertentu. Kualitas dalam hal ini adalah kualitas yang baik, sedangkan kualitas yang kurang baik bila atribut-atribut dan standar-standar yang tidak dapat dipenuhi secara lengkap. Dengan demikian berbagai kualitas berbeda-beda pula atributnya tergantung dari fungsi tujuan yang ingin dicapai. Misalnya fungsi ketahanan, kesehatan, kecerdasan, kepemimpinan, dan sebagainya. Tiap-tiap fungsi tersebut memerlukan atribut-atribut yang sesuai dan mendukung sehingga tercapai tujuan yang dimaksud masing-masing fungsi tersebut. Berkaitan dengan penelitian ini maka yang dimaksud dengan kualitas aparatur pelaksana adalah kualitas di KTKP Kabupaten Kendal.

Penyelenggara KTKP sebagai sumber daya manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumberdaya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk

menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomi yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan kerja dapat diukur dengan usia dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja. Secara singkat tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (Simanjuntak, 1985: 1).

Kedua kegiatan tersebut mengandung aspek kualitas dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja, dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia diberikan untuk produksi. Pengertian tersebut juga menegaskan bahwa sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Sebagaimana halnya dengan sumber daya-sumber daya material dan finansial, sumberdaya manusia juga mempunyai keterbatasan. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengembangan sumberdaya manusia, sehingga sumberdaya manusia dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengembangan sumberdaya manusia ini dipengaruhi oleh dua kelompok faktor yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas sumberdaya manusia tersebut, dan faktor kondisi yang mempengaruhi pengembangan perekonomian yang kemudian mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia tersebut (Juni Prihatin, 1997).

Menurut Notoatmodjo (1992:4), kualitas sumber daya manusia (aparatur) dapat dilihat dari dua faktor, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia. Sedangkan kualitas menyangkut

mutu sumber daya manusia, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan nonfisik (kecerdasan dan mental). Untuk mempercepat pembangunan dibidang apapun, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama. Kualitas sumber daya ini menyangkut dua aspek juga, yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas nonfisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan ketrampilan-ketrampilan lain. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini juga diupayakan melalui program kesehatan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan-kemampuan nonfisik tersebut maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah yang paling diperlukan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kualitas aparatur adalah kualitas nonfisik para penyelenggara KTKP di Daerah Kabupaten Kendal, yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan ketrampilan.

b. Pengukuran Kualitas Aparatur

Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik, jelas dan konsisten, ketika diimplementasikan belum tentu akan memberikan hasil yang baik. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai. Aspek kualitas personil merupakan unsur penting dalam suatu kebijakan. Hal ini dinyatakan pula oleh George C. Edwards III (dalam Abdul Wahab, 1997 : 76) bahwa personil merupakan sumber daya yang paling asensial dalam implementasi kebijakan, karena kegagalan dalam implementasi kebijakan hanya disebabkan oleh personil yang kurang handal.

Sejalan dengan pendapat Edwards III tersebut dan adanya tingkat kesulitan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah terutama dalam tahap awal pemberian informasi agar masalah lebih jelas. Kondisi ini tentunya sangat menuntut tersedianya kualitas aparatur pelaksana program penanganan sampah yang memadai. Dalam pengamatan awal dilapangan ternyata dalam implementasi program penanganan sampah kondisi aparat pelaksana yang kurang mendukung adalah kualitas aparat pelaksana tingkat bawah terutama dilihat dari aspek pendidikan dan kesejahteraannya. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan program akan dapat meningkatkan kemampuan dasar yang memadai dari berbagai prosedur administratif, teknis, tujuan, manfaat dan dampak dari program yang pada akhirnya meningkatkan kecakapan dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat pelaksana program. Sedangkan insentif yang memadai akan dapat melahirkan ketekunan dan motivasi pengelolaan program penanganan sampah. Jadi diperlukan perpaduan antara faktor kemampuan dan kemauan (motivasi kerja). Jika kedua unsur ini telah terpenuhi maka kualitas aparat pelaksana akan dapat terwujud sesuai dengan harapan yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan kebijakan penanganan sampah itu sendiri.

Selanjutnya Notoatmodjo (1992 : 4), mengemukakan bahwa pendidikan dan latihan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk intervensi, oleh karena itu setiap organisasi atau instansi yang berkembang harus mempunyai perhatian yang lebih besar pada pendidikan dan latihan. Pentingnya pendidikan dan latihan bagi organisasi antara lain :

- 1) Sumberdaya manusia atau karyawan yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam organisasi belum tentu mempunyai kemampuan yang

sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam jabatan bukan karena kemampuan, melainkan karena tersedianya formasi. Oleh sebab itu karyawan atau staf baru ini perlu penambahan kemampuan yang mereka perlukan.

- 2) Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jelas akan mempengaruhi suatu organisasi atau instansi. Oleh sebab itu jabatan-jabatan yang dulu belum diperlukan sekarang diperlukan. Kemampuan orang yang akan menempati jabatan tersebut kadang-kadang tidak ada. Dengan demikian perlu diadakan penambahan atau peningkatan kemampuan yang diperlukan oleh jabatan tersebut.
- 3) Promosi dalam suatu organisasi atau instansi adalah suatu keharusan apabila organisasi itu mau berkembang. Pentingnya promosi bagi seseorang adalah sebagai salah satu *reward* (ganjaran) dan insentif (perangsang). Adanya ganjaran dan perangsang yang berupa promosi dapat meningkatkan produktivitas kerja bagi seorang karyawan yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu itu masih belum cukup, untuk itulah diperlukan pendidikan atau pelatihan tambahan.

Menurut teori *Human Capital*, pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia (karyawan) dalam rangka mencapai tujuan. Pendidikan dan latihan tidak saja menambah pengetahuan akan tetapi juga meningkatkan ketrampilan bekerja dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja. Asumsi teori *Human Capital* adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui tingkat pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak peningkatan kemampuan kerja dan tingkat

penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Di samping penundaan menerima penghasilan tersebut orang yang melanjutkan sekolah harus membayar biaya secara langsung seperti uang sekolah dan lain sebagainya (Simanjuntak, 1982).

Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas, akan tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada disekitarnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi produktivitas. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa latihan kerja melengkapi karyawan dengan ketrampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Pada dasarnya latihan melengkapi pendidikan. Pendidikan biasanya bersifat umum, sedangkan latihan kerja bersifat khusus dan teknis operasional (Simanjuntak, 1985 : 30 - 32).

Selanjutnya Hadari Nawawi (1998 : 208 - 217) mengemukakan bahwa pelatihan adalah program-program untuk memperbaiki kemampuan melaksanakan pekerjaan secara individual, kelompok dan atau berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi. Pengertian lain mengatakan bahwa pelatihan adalah proses melengkapi para pekerja dengan ketrampilan khusus atau kegiatan membantu para pekerja dalam memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang tidak efisien. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa kegiatan pengembangan pegawai sebagai usaha membantu pegawai agar menguasai berbagai kemampuan yang dibutuhkan organisasi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien dimasa mendatang. Kegiatan pengembangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang salah satu diantaranya dapat berbentuk kegiatan pelatihan.

Suatu pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan atau pendidikan lebih bersifat filosofis dan teoritis dibanding dengan kegiatan training (latihan). Lagi pula kegiatan pengembangan/pendidikan lebih diarahkan untuk golongan manajer sedangkan program latihan ditujukan untuk golongan non manajer (Srikula dalam Susilo, 1990 : 56). Akan tetapi dibalik itu tersurat apapun tujuannya yang jelas pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia. Disamping itu sumber daya manusia menentukan karakter dan langkah pembangunan ekonomi dan sosial bukan modal dan bukan pula sumber-sumber materialnya. Keadaan ini adalah sama dengan konsep belajar yang dikemukakan kamus Inggris yang berarti memperoleh pengetahuan atau ketrampilan dibidang tertentu. Selanjutnya Peter Senge mengemukakan bahwa melalui belajar kita menemukan kembali diri kita. Melalui belajar kita menjadi mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Melalui belajar kita menambah kemampuan mencipta kita dan menjadi bagian dari proses menghasilkan dalam kehidupan (dalam Megginson, 1993 : 69).

Proses belajar seseorang berhubungan dengan bagaimana belajar dilakukan dan bukan hasilnya. Proses mendasar yang mengarah pada proses belajar seseorang adalah pengalaman. Semakin intensif dan ekstensif, semakin mungkin terjadi proses belajar. Dengan demikian belajar akan dipengaruhi oleh berbagai situasi yang dihadapi seseorang. Hasil belajar yang mengarah pada peningkatan kemampuan akan mencerminkan keanekaragaman sifat, dan intensitas dari apa yang harus dilakukan oleh seseorang, juga kesempatan untuk mengalami hal-hal yang baru dan berbeda. Jadi proses belajar seseorang akan terus terjadi karena orang adalah manusia dan belajar

adalah salah satu karakteristik manusia. Belajar sambil bekerja biasanya diartikan sebagai belajar demi pekerjaan, dan ada harapan besar bahwa bagian dari apa yang dipelajari akan berhubungan dan menunjang kebutuhan pekerjaan sekarang dan masa yang akan mendatang. Dengan demikian akan semakin besar proporsi belajar yang berhubungan dengan pekerjaan, semakin besar pula kemampuan seseorang (Megginson, 1997 : 72 - 73).

Berdasarkan berbagai teori tentang komunikasi di atas, maka penulis mencoba untuk mengkaji komunikasi program penanganan sampah di lingkungan KTKP Kabupaten Kendal dengan menggunakan teori Notoatmodjo, yaitu kualitas aparatur dapat dilihat dari aspek kualitas dan kuantitas dimana unsur kualitas perlu ditunjang dengan pendidikan dan latihan agar aparatur mampu meningkatkan prestasi dalam bekerja, berpikir dan memiliki ketrampilan.

5. Koordinasi Program

a. Dimensi Koordinasi

Perihal pengertian koordinasi telah banyak pakar yang memberikan definisinya. Ada pakar yang memberikan definisi bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan organisasi yang terpisah (departemen-departemen, bidang-bidang, atau fungsi-fungsi) satu organisasi untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien (Handoko, 1997). Ada pula pakar yang memberikan pengertian koordinasi sebagai proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari

suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Stoner, 1986 : 281).

Berdasarkan dua konsep koordinasi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa koordinasi mempunyai sasaran-sasaran agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan seefisien mungkin. Untuk mencapai tujuan organisasi dengan seefisien mungkin tersebut, maka disadari sepenuhnya bahwa organisasi yang bersangkutan merupakan suatu sistem yang mana di dalamnya terdapat unit-unit atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Setiap unit walaupun mempunyai fungsi yang berlainan satu dengan yang lainnya tidak dapat saling melepaskan diri dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini dikarenakan suatu unit tidak mungkin dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa dibantu oleh unit yang lainnya, dan oleh karena itu pula maka setiap unit mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan fungsi dari unit yang lainnya apabila organisasi yang bersangkutan menginginkan dapat mencapai tujuannya dengan seefisien mungkin. Untuk keperluan seperti itulah maka diperlukan adanya koordinasi.

Apabila semua kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan (KTKP) ingin dicapai dengan seefisien mungkin, maka koordinasi dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sangat mutlak diperlukan. Dalam organisasi KTKP terdapat unit-unit yang mempunyai kegiatan saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran KTKP secara keseluruhan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila Dan Sugandha (1988 : 12 - 13) memberikan pengertian bahwa koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit

organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien. Pengertian ini jelas paralel dengan pengertian koordinasi sebagaimana dikemukakan di muka.

1). Relevansi Koordinasi

Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh KTKP, maka koordinasi sangat diperlukan karena mungkin ada perbedaan pendapat mengenai bagaimana tujuan harus dicapai, atau bahkan mungkin adanya perbedaan mengenai tujuan itu sendiri. Selain itu, perlu dipastikan bahwa penggunaan sumber daya yang ada dialokasikan secara tepat. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diyakini bahwa kegiatan suatu unit dalam organisasi KTKP sejalan dengan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang lainnya.

Perlunya diadakan koordinasi ternyata dapat disebabkan oleh beberapa macam faktor sebagaimana dinyatakan oleh banyak pakar. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan tuntutan perlunya koordinasi adalah sebagai berikut :

- a). Untuk efisiensi dalam penggunaan sumber yang terbatas,
- b). Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik,
- c). Untuk memperoleh keseragaman dalam pengambilan kebijakan,
- d). Untuk memperoleh kaitan / hubungan kerja yang efektif sehingga satu unit dapat menunjang unit yang lain.
- e). Untuk menghilangkan duplikasi.

Mengenai pentingnya koordinasi Bernard (dalam Dan Sugandha, 1988 : 22) mengemukakan bahwa koordinasi yang dapat dicapai melalui

leadership merupakan faktor yang paling vital bagi kelestarian organisasi. Oleh karena itu *leadership* dapat dipandang sebagai kualitas daripada sifat dan tanggung jawab yang dapat mengikat, mempersatukan kehendak-kehendak daripada orang-orang untuk mencapai tujuan-tujuan diluar cita-citanya sendiri.

2). Tipe-Tipe Koordinasi

Dalam kenyataannya kegiatan menyatupadukan atau mengkoordinasikan cukup bervariasi bentuk dan lingkupnya. Misalnya, koordinasi dapat dilakukan untuk menyatupadukan kegiatan organisasi-organisasi sederajat tingkatannya, akan tetapi dapat pula dilakukan untuk menyatupadukan kegiatan organisasi atasan dan bawahan. Oleh karena itu koordinasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis koordinasi sesuai dengan lingkup dan arah jalurnya sebagai berikut (Dann Sugandha, 1988 : 25 - 26) :

a). Menurut lingkupnya terdapat :

- (1). Koordinasi intern, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi.
- (2). Koordinasi ekstern, yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.

b). Menurut arahnya, terdapat :

- (1). Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hirarki yang sama dalam suatu organisasi, dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat.

- (2). Koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antar pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit atasnya langsung, juga cabang-cabang organisasi oleh organisasi induknya.
- (3). Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hirarkinya.
- (4). Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi atau karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu.

Sehubungan dengan KTKP, maka koordinasi yang diterapkan terdapat beberapa kemungkinan yang muncul. Kemungkinan yang akan muncul adalah :

- a). Satu kegiatan dikerjakan oleh beberapa instansi,
- b). Beberapa kegiatan dikerjakan oleh beberapa instansi.

3). Mekanisme Koordinasi

Pelaksana koordinasi dapat berjalan hanya dengan adanya kesadaran dan kesediaan dari semua anggota organisasi atau pimpinan organisasi dalam pelaksanaan kerja dibawah pengarahannya seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu (Dan Sugandha, 1981 : 27 - 28). Sebenarnya sikap kesadaran dan kesediaan yang diperlukan agar koordinasi dapat berjalan dengan lancar tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang dikoordinir, akan tetapi sikap tersebut juga melibatkan mereka yang mengkoordinir.

Sikap kesadaran dan kesediaan seperti tersebut diatas biasanya hanya bisa tumbuh dengan baik apabila setiap pihak benar-benar mengerti dan menghayati kedudukan dan fungsinya masing-masing serta kedudukan dan fungsi koordinator. Agar tercipta suasana saling pengertian dari setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi, maka salah satunya diperlakukan adanya komunikasi yang efektif. Oleh karena itu dapatlah dinyatakan bahwa komunikasi merupakan mekanisme yang relatif ampuh bagi terselenggarakannya koordinasi.

Dalam proses komunikasi tersebut yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang bekerja sama yang terkoordinir adalah mengenai tujuan daripada kerjasama tersebut dan peranan yang harus dijalankan dari setiap pihak yang terlibat. Dengan adanya komunikasi inilah diharapkan terjadi saling tukar menukar informasi dan dapat menumbuhkan rasa saling pengertian. Sehubungan dengan hal ini komunikasi tampak mempunyai peran menyatukan / mengikat setiap unit yang terlibat dalam kerjasama dalam suatu sistem.

Guna terciptanya komunikasi yang baik agar dapat menimbulkan kerjasama dalam koordinasi yang baik pula, maka koordinasi harus bersifat terbuka. Adapun artinya, dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dikoordinir mampu diciptakan komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik. Apabila dapat berlangsung komunikasi dua arah, berarti terbuka kesempatan bagi pihak-pihak yang dikoordinir untuk mengemukakan pendapat, berdiskusi mengenai masalah-masalah yang dihadapi baik dengan pihak lainnya yang juga dikoordinir atau bahkan dengan pihak koordinator. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

koordinator harus menampakkan diri dengan sifat-sifat yang menunjang, koordinator jangan sekali-kali menampakkan dirinya mendikte atau memberi perintah dalam melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang dikoordinir. Dalam kondisi seperti ini, maka dapat dinyatakan bahwa koordinator melakukan peran kepemimpinan yang partisipatif.

b. Pengukuran Koordinasi

Agar dalam organisasi dapat dicapai hasil kerja yang efektif dan efisien, maka kegiatan yang ada didalamnya harus terkoordinasikan. Menciptakan adanya suatu koordinasi yang baik tidaklah mudah, tidak hanya sekedar membutuhkan kerangka organisasi yang tepat, akan tetapi lebih dari itu, faktor manusia yang menjalankan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Riggs (1979 : 67 - 68) menyatakan bahwa koordinasi merupakan tahapan akhir sebelum didahului dengan kegiatan ko operasi (bekerjasama) antar unit. Dalam rangka bekerjasama itu terdapat hal yang sangat berpengaruh bagi berhasil atau tidaknya kerjasama tadi, yakni tergantung pada baik tidaknya hubungan antar manusia yang ada pada unit yang saling bekerjasama tadi. Hubungan antar manusia yang baik tergantung pula pada ada tidaknya saling pengertian diantara mereka, dan untuk menciptakan adanya saling pengertian tadi perlu adanya komunikasi yang baik antar mereka sendiri.

Selanjutnya Dan Sugandha (1988 : 47 - 48) mengemukakan bahwa untuk dapat menciptakan koordinasi perlu menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1). Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
- 2). Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.
- 3). Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.
- 4). Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.
- 5). Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah tersebut.
- 6). Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
- 7). Adanya saling hormat terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.

Jadi menurut Dan Dugandha, untuk menciptakan koordinasi yang maksimal dalam pelaksanaan suatu program sebuah organisasi diperlukan adanya kerjasama, kesepakatan, kesatuan pengertian, loyalitas, informasi yang jelas dan adanya saling hormat terhadap kewenangan masing-masing pihak yang terlibat dalam program tersebut. Pendapat tersebut kemudian penulis ambil untuk mengetahui seberapa jauh hubungan koordinasi terhadap pelaksanaan program penanganan sampah di KTKP Kabupaten Kendal.

B. HIPOTESIS

1. Hipotesis Minor

Dalam hipotesis minor ini menyebutkan tiga variabel bebas X_1 , X_2 , X_3 yaitu :

X_1 : variabel komunikasi

X_2 : variabel kualitas aparat pelaksana

X_3 : koordinasi program

yang berpengaruh pada variabel Y yaitu efektifitas program penanganan sampah di Kabupaten Kendal.

Hipotesis nol (H_0) menyebutkan tidak ada pengaruh dan signifikan antara variabel bebas dengan variabel terkait.

Hipotesis alternatif (H_a) menyebutkan ada pengaruh dan signifikan antara variabel bebas dengan variabel terkait.

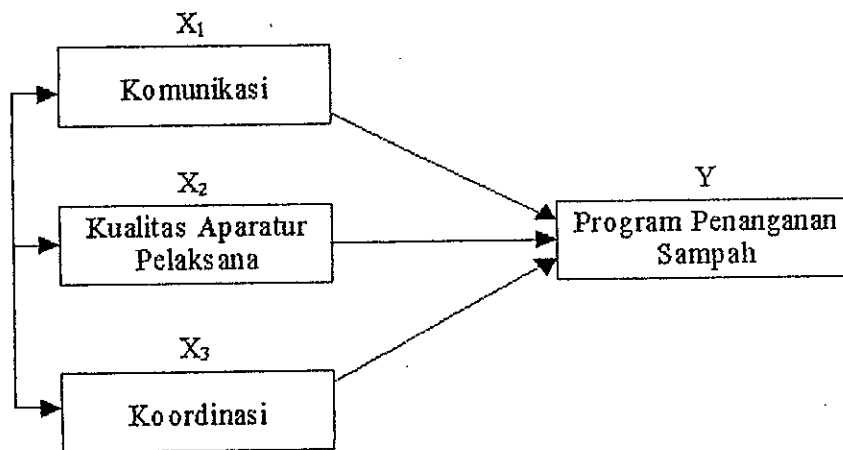
Pada hipotesis ini disebutkan :

- a. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel komunikasi dengan efektifitas program penanganan sampah di Kabupaten Kendal
- b. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas aparatur dengan pelaksanaan program penanganan sampah di Kabupaten Kendal
- c. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel koordinasi dengan pelaksanaan program penanganan sampah di Kabupaten Kendal.

2. Hipotesis Mayor

Dalam hipotesis mayor disebutkan ada pengaruh positif dan signifikan ketiga variabel bebas X_1 , X_2 , dan X_3 secara bersama-sama terhadap efektifitas program penanganan sampah di Kabupaten Kendal.

Adapun model dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian pada hakekatnya merupakan penggambaran cara-cara seseorang peneliti guna memenuhi tujuan studi yang ditetapkan atau dengan kata lain rancangan penelitian merupakan suatu rencana logis untuk menguji hipotesis, sehingga dengan melihat rancangan penelitian dapat diketahui arah dan tujuan penelitian, tipe dan jenis penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang akan didukung dengan analisis deskriptif kualitatif, sebab penulis akan membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dan membuat analisis berdasarkan data yang ada serta mendeskripsikannya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki.

B. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini fokusnya mengenai pelaksanaan program penanganan sampah dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu komunikasi, kualitas aparatur dan koordinasi. Unit analisis dalam penelitian adalah pegawai pada Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal.

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan dan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi yaitu tingkat efektifitas kebijakan yang akan

diamati. Di samping itu lokasi penelitian akan memperhatikan beberapa aspek seperti daya jangkau penelitian dengan tempat tinggal, waktu yang tersedia, dukungan data atau kemudahan untuk memperoleh data dilokasi penelitian.

Penelitian terhadap komunikasi, kemampuan aparatur pelaksana, ketersediaan sarana prasarana dan efektifitas program ini dilakukan di Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal dengan harapan efektifitas kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Kendal dapat ditingkatkan. Di samping itu secara kebetulan penulis adalah PNS dilingkungan Kabupaten Kendal, sehingga dengan demikian diharapkan akan lebih terjangkau dalam hal pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Variabel Penelitian

Variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Definisi Bebas, yang meliputi :
 - a. Komunikasi (X_1)
 - b. Kualitas Aparatur (X_2)
 - c. Koordinasi (X_3)
2. Variabel Tergantung, yaitu Efektifitas Pelaksanaan Program Penanganan Sampah.
3. Definisi Konseptual.
 - a. Efektifitas pelaksanaan program adalah seberapa jauh suatu program atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan melihat dari hasil yang diperoleh dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - b. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

- c. Kualitas aparatur pelaksana adalah suatu kondisi atau keadaan yang menunjukkan tingkat kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh aparat pelaksana dalam melaksanakan program atau kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya.
- d. Koordinasi adalah proses penyatupaduan pandangan, pendapat dan kegiatan dari unit-unit terpisah untuk mencapai tujuan pelaksanaan program penanganan sampah secara efisien.

4. Definisi Operasional.

- a. Efektifitas program penanganan sampah adalah seberapa jauh pelaksanaan program penanganan sampah mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta pencapaian kualitas penanganan sampah. Variabel ini dapat diukur dari :
 - 1) Tingkat realisasi penampungan sampah.
 - 2) Perbandingan tingkat produktivitas sampah dengan kemampuan penanganannya.
- b. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan aparatur pemerintah mengenai program penanganan sampah di Kabupaten Kendal secara langsung maupun tidak langsung kepada sasaran agar tercipta saling pengertian dan demi kelancaran pelaksanaan program. Variabel ini dapat diukur dari :
 - 1) Tingkat kejelasan penyampaian gagasan.
 - 2) Tingkat ketelitian terhadap tujuan komunikasi.
 - 3) Tingkat ketepatan waktu dalam melakukan komunikasi.
 - 4) Tingkat perhatian terhadap kondisi yang dihadapi saat komunikasi berlangsung.

- c. Kualitas aparat pelaksana adalah suatu kondisi atau keadaan yang menunjukkan tingkat kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh aparat pelaksana program penanganan sampah dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kebijakan atau program penanganan sampah yang menjadi tanggungjawabnya agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Variabel ini dapat diukur dari :

- 1) Tingkat pendidikan formal yang pernah diikuti pegawai KTKP.
 - 2) Frekuensi pelatihan yang pernah diikuti pegawai KTKP.
 - 3) Tingkat pengalaman kerja pegawai KTKP.
 - 4) Tingkat kesalahan pegawai KTKP dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Koordinasi adalah proses penyatupaduan pandangan dari unit-unit organisasi dalam rangka pelaksanaan program penanganan sampah di Kabupaten Kendal. Variabel ini dapat diukur dari :
- 1) Tingkat pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan.
 - 2) Tingkat pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Tingkat pelaksanaan evaluasi kegiatan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini pada pokoknya digolongkan menjadi dua jenis data, yaitu :

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang berasal dari jawaban terhadap daftar pertanyaan.
- b. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari wawancara terhadap sumber data.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner, wawancara serta observasi di lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah diolah oleh pihak lain di luar penelitian ini, bisa diperoleh dari literatur-literatur (brosur, buku, majalah dan dokumen) yang ada hubungannya dengan penelitian.

Sesuai dengan subyeknya, penelitian ini akan dilakukan pada pegawai di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan dalam wujud kuesioner. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti .

Dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat utama dengan menggunakan pertanyaan terstruktur baik terbuka maupun tertutup, sedangkan pertanyaan terstruktur tertutup memuat nilai yang akan di skor. Untuk mendapatkan skor dari setiap jawaban responden, setiap pertanyaan mempunyai 4 (empat) alternatif jawaban berurutan dan berjenjang dari jawaban terbaik hingga terburuk. Adapun setiap pilihan jawaban diberi skor tertentu, yaitu :

- Jawaban A diberi skor 4
- Jawaban B diberi skor 3
- Jawaban C diberi skor 2
- Jawaban D diberi skor 1

Masing-masing jawaban diberi kriteria :

1. Kategori jawaban yang sangat mendukung diberikan skor 4 (empat).

2. Kategori jawaban yang mendukung diberikan skor 3 (tiga).
3. Kategori jawaban yang kurang mendukung diberikan skor 2 (dua).
4. Kategori jawaban yang tidak mendukung diberikan skor 1 (satu).

Kategori jawaban dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, misal (selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah), dan seterusnya.

G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan mudah diduga (Singarimbun dan Efendi, 1985 : 108). Dengan pertimbangan efisiensi tenaga, biaya dan waktu sebagaimana penegasan Mantra dan Kasto (dalam Singarimbun dan Efendi, 1985 : 105 – 106) dimana jumlah sampel yang representatif tidaknya mengacu pada empat faktor yaitu :

1. Derajat keseragaman dari populasi, makin seragam populasi makin kecil sampel yang dapat diambil.
2. Presisi yang dikehendaki dari pemelihara, makin tinggi tahun presisi yang dikehendaki makin besar sampel yang harus diambil.
3. Rencana analisa. Adakalanya besarnya sampel sudah mencukupi sesuai dengan presisi yang dikehendaki, tetapi kalau ini dikaitkan dengan kebutuhan analisa maka jumlah sampel tersebut kurang mencukupi.
4. Tenaga, biaya dan waktu. Kalau menginginkan presisi yang tinggi maka jumlah sampel harus besar. Tetapi bila tenaga, biaya dan waktu terbatas maka tidak mungkin untuk mengambil sampel yang besar sebab ini berarti bahwa presisinya akan menurun.

Pada penelitian ini jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 21 orang PNS dan 19 orang tenaga kontrak yang merupakan jumlah dari populasi pegawai yang

terdapat pada Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal. Penentuan ini didasarkan pada pendapat Suharsimi Arikunto (1993 : 107) yang mengatakan bahwa :

“ Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subyek lebih dari 100 dapat diambil antara 10 – 15 % atau 20 – 25 % atau maksimal 30 % “.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (Random Sampling) yaitu sampel diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit peneliti atau satuan elementer dari populasi merupakan kesempatan yang sama untuk diperoleh sebagai sampel. Kepada mereka diberikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan kebijaksanaan penanganan sampah

Di samping itu wawancara juga dilakukan dengan para pejabat yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan penanganan sampah. Adapun cara memilih responden dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pihak yang diajak wawancara dipilih dari orang-orang yang benar-benar memahami kebijaksanaan penanganan sampah.
- b. Penduduk yang dijadikan responden harus orang-orang yang terlibat langsung dengan penanganan sampah.
- c. Penentuan jumlah responden yang relatif sedikit semata-mata untuk efisiensi waktu, tenaga dan biaya. Namun dengan persyaratan pada point a dan b data yang diperoleh masih cukup valid.

Adapun pihak-pihak yang dijadikan responden untuk wawancara yaitu :

Pejabat Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Kelurahan, Ketua RT/RW dan beberapa penduduk yang bertempat tinggal di kelurahan/desa (30 orang).

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Penyebaran instrumen penelitian melalui daftar pertanyaan, yaitu teknik pengumpulan data dari responden/sumber data primer dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis.
Daftar pertanyaan digunakan untuk memperoleh data tentang tanggapan responden mengenai komunikasi, kualitas aparat dan koordinasi yang ada di Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dari responden/sumber data primer dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.
3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal.
4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis (dokumen-dokumen) yang langsung berhubungan dengan objek penelitian (data sekunder).

I. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah :

1. Analisa Data Kuantitatif, yang merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan perhitungan dengan menggunakan angka-angka.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif yang akan diuji dengan statistik Rank Tau Kendall untuk korelasi sederhana dan korelasi konkordansi Kendall untuk korelasi ganda. Hal ini dilakukan dengan

pertimbangan data penelitian merupakan data ordinal (jenjang), maupun data rasio yang diordinalkan. Alat analisis yang dipakai adalah :

a. Korelasi Rank Kendall

Rumus ini gunakan untuk menguji hipotesa minor yaitu hubungan antara X_1 , X_2 , X_3 dan dengan Y , adapun rumusnya sebagai berikut :

$$T = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N (N - 1)}}$$

Keterangan :

T = Koefisien korelasi Rank Kendall antara variabel x dan y

S = Jumlah observasi skor untuk semua pasangan

N = Banyaknya obyek atau individu yang diurutkan pada x dan y

Apabila terdapat banyak nilai yang sama pada observasi x dan y , maka rumus yang digunakan adalah :

$$T = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N (N - 1) - T_x \frac{1}{2} N (N - 1) - T_y}}$$

Keterangan :

T_x = banyak observasi berangka sama dengan tiap kelompok angka sama pada variabel x

T_y = banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada variabel y

Untuk uji signifikansinya dengan menggunakan rumus Z -test, maka karena N penelitian lebih besar dari 10, dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{T}{\sqrt{\frac{2 (2N + 1)}{9N (N - 1)}}$$

Kemudian harga Z dikonsultasikan dengan tabel untuk menentukan besarnya pengaruh antara variabel tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila $Z_o \geq Z_t$ pada taraf signifikan 1%, sangat signifikan, hipotesa diterima.
- b. Apabila $Z_o \leq Z_t$ pada taraf signifikan 5%, berarti sangat signifikan, hipotesa diterima.
- c. Apabila $Z_o \geq Z_t$ pada taraf signifikan 5%, berarti tidak signifikan, hipotesa ditolak.

b. Korelasi Berganda

Perhitungan korelasi berganda menggunakan koefisien koordinat Kendall (W) dengan rumus sebagai berikut :

$$W = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} K^2 (N - N) - K \Sigma T}}$$

T = faktor korelasi

T = banyaknya observasi dalam satu kelompok yang memperoleh angka sama untuk ranking tertentu.

Σ = Mengarahkan menjumlahkan semua kelompok angka sama dalam masing-masing ranking.

Untuk menguji signifikansi Koefisien Koordinat Kendall, perlu diadakan test dengan rumus :

$$X^2 = K (N - 1) W$$

Keterangan :

$$X^2 = \text{Rest Chi Square}$$

W = Koefisien Konkordasi Kendall

Kemudian hasil perhitungan X^2 tersebut dikonsultasikan terhadap harga Kristis Chi Quare dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika X^2 hitung $\geq X^2$ 1% maka sangat signifikan
- b. Jika X^2 hitung $\leq X^2$ tab maka hubungan signifikan.
- c. Jika X^2 hitung $\leq X^2$ tab maka hubungan tersebut tidak signifikan.

Selanjutnya untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel tergantung dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi berganda (W^2). Jika W^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan semakin besar (*mendekati satu*), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi variabel tergantung semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin besar untuk menerangkan variasi variabel tergantungnya. Sebaliknya jika W^2 menunjukkan semakin kecil (*mendekati nol*), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi nilai variabel tergantung semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan semakin lemah untuk menerangkan variasi variabel tergantung. Secara umum dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi berganda (W^2) berada antara 0 dan 1 atau $0 \leq W^2 \leq 1$.

2. Analisis Kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan obyek penelitian apa adanya dengan melakukan interpretasi data, yaitu analisis data dengan tanpa menggunakan alat statistik yang digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman dari obyek penelitian untuk mencoba mengangkat hal-hal yang belum terungkap.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan akan diuraikan dalam masing-masing variabel yang didukung oleh tabel-tabel tunggal dengan penjelasan tabel sebagai berikut :

- Tabel IV.1 s/d IV.6, penjelasan variabel efektivitas program.
- Tabel IV.7 s/d IV.10, penjelasan variabel komunikasi.
- Tabel IV.11 s/d IV.14, penjelasan kualitas aparat pelaksana.
- Tabel IV.15 s/d IV. 18, penjelasan koordinasi program.

1. Efektivitas Program Penanganan Sampah

Efektivitas program penanganan sampah di Kabupaten Kendal merupakan variabel utama yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam melihat tingkat efektivitas program ini maka akan dilihat secara lebih mendalam tentang aktivitas Pemerintah daerah dalam pelaksanaan program, frekuensi penyuluhan persampahan, tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program serta indikator lainnya yang sangat terkait dengan efektivitas program. Berkaitan dengan tanggapan responden tentang aktivitas Pemerintah daerah dalam pelaksanaan program penyuluhan sampah dapat terlihat pada Tabel IV.1. berikut ini :

Tabel IV.1.
Aktivitas Pemda dalam Penyuluhan Sampah

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Aktif	6	15,0
Cukup Aktif	6	15,0
Aktif	18	45,0
Sangat Aktif	10	25,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.1.

Tabel IV.1. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 45,0% menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dinilai aktif didalam melaksanakan program penyuluhan tentang sampah. Semenataara itu hanya terdapat masing-masing 15,0% yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dirasa masih sangat kurang aktif dalam melaksanakan program penyuluhan sampah kepada masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan beberapa responden menilai bahwa Pemerintah Daerah kurang dalam melaksanakan program penyuluhan yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan mereka tentang pelaksanaan program. Hal ini dapat terjadi karena didalam unit kerja terdapat beberapa bagian yang secara tidak secara langsung berhubungan dengan masalah pelaksanaan program seperti bagian personalia, bagian tata usaha serta bagian perlengkapan.

Melalui penyuluhan kepada masyarakat, program penanganan sampah diharapkan dapat berlangsung sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam Peraturan Daerah No. 20 Tahun 1991. Oleh karena itu keaktifan para petugas dalam memberikan penyuluhan turut menentukan sejauh mana program tersebut dapat diketahui oleh masyarakat.

Untuk melihat frekuensi penyuluhan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam program penyuluhan sampah dapat dilihat Tabel IV.2 sebagai berikut :

Tabel IV.2
Frekuensi Penyuluhan Persampahan Tahun 2001

Keterangan	Frekuensi	Persen
< 2 kali/setahun	5	12,5
2-4 kali/setahun	8	20,0
5-6 kali/setahun	15	37,5
> 6 kali /setahun	12	30,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.2.

Tabel IV.2 di atas menunjukkan bahwa 37,5 % dari responden menyatakan 5-6 kali/setahun Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal mengadakan penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat baik dilakukan terkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Pengelolaan Pasar, Kantor Pengelolaan Lingkungan dan lain-lain maupun penyuluhan yang dilakukan instansi Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan (KTKP) sendiri. Kegiatan penyuluhan ini memang menjadi prioritas bagi KTKP untuk menghindari berbagai kemungkinan bahaya yang ditimbulkan dari akibat pengelolaan sampah yang tidak benar pada musim penghujan, mengingat daerah Kendal sangat berpotensi tergenang banjir.

Keaktifan penyuluhan persampahan ini merupakan upaya yang selalu digalakkan oleh pimpinan KTKP demi menciptakan lingkungan Kendal yang bersih sehingga mampu menunjukkan kepada masyarakat akan nilai kebersihan bagi kehidupan. Sedangkan mereka yang menyatakan penyuluhan yang dilakukan

oleh petugas sebanyak kurang dari dua kali setiap tahun atau 12,5 % adalah mereka yang umumnya mendapat tugas di Kecamatan yang paling jauh di Kabupaten Kendal. Baginya sangat sulit untuk memberikan penyuluhan pada waktu-waktu tertentu kepada masyarakat seperti yang dijadwalkan karena sulitnya mengumpulkan penduduk yang mayoritas kehidupannya bertani pada siang hari dan malam hari mereka malas untuk keluar rumah lagi. Penduduk akan keluar mendengar / menerima informasi tentang kebersihan hanya pada waktu menjelang peringatan 17 Agustus dan menjelang Hari Raya Idul Fitri pada setiap tahun.

Informasi yang disampaikan oleh petugas kepada masyarakat dibuat semenarik mungkin dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan agar diperoleh tanggapan yang baik dari masyarakat.

Guna melihat hasil penelitian keberhasilan penyampaian informasi tentang pengelolaan sampah yang benar dapat dilihat pada Tabel IV.3 sebagai berikut :

Tabel IV.3
Kualitas Penyuluhan Persampahan

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Baik	6	15,0
Cukup Baik	9	22,5
Baik	10	25,0
Sangat Baik	15	37,5
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.3.

Tabel IV.3 di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya petugas dalam menyampaikan informasi tentang persampahan sangat baik, yang dapat dibuktikan 37,5 % jawaban responden. Artinya para petugas ini dalam penyuluhan tentang

persampahan sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat yang dapat dibuktikan dengan berbagai laporan hasil kegiatan kebersihan setiap periode triwulan maupun tiap semester dari unit-unit pengelola sampah maupun kecamatan.

Bagi petugas yang 15 % menyatakan kualitas penyuluhan persampahan kurang baik ini disebabkan oleh keterbatasan petugas dalam penyampaian informasi tentang pengelolaan sampah. Harus disadari bahwa tidak semua petugas mampu dengan mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat yang heterogen dari segala unsurnya baik pendidikan, lingkungan, mata pencaharian dan lainnya. Hal ini merupakan kendala bagi petugas sehingga kualitas penyuluhan yang diharapkan jauh dari keadaan yang terjadi di suatu daerah dan mungkin saja meleset dari program kerja yang telah dibuat.

Sementara itu mereka yang menjawab 22,5 % - 25 % menyatakan baik dan cukup baik adalah mereka yang biasa bertugas menyampaikan penyuluhan pada lingkungan yang sudah terbiasa menanamkan kebiasaan hidup bersih dalam keluarga di samping tingkat pendidikan dan pola berpikir yang lebih baik serta memahami dengan benar maksud kebersihan bagi lingkungan.

Kemampuan petugas dalam menyampaikan informasi tentang penanganan sampah kepada masyarakat, misalnya : diawali dengan membuka kesempatan berdialog secara langsung mengemukakan kesulitan masyarakat membuang sampah pada penampungan sementara yang terasa jauh, merupakan cara yang simpatik melibatkan masyarakat secara aktif dalam usaha mempopulerkan program penanganan sampah.

Kemudian untuk melihat seberapa tanggap petugas dalam melibatkan masyarakat pada masalah persampahan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.4 sebagai berikut :

Tabel IV.4
Tingkat Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Keterangan	Frekuensi	Persen
Jarang	2	5,0
Cukup Sering	2	5,0
Sering	20	50,0
Sangat Sering	16	40,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.4.

Tabel IV.4 di atas menunjukkan bahwa 50 % responden sering melibatkan masyarakat dalam aktifitas penyuluhan persampahan. Hal ini secara kebetulan pekerjaan yang petugas lakukan merupakan bagian yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya memberikan penyuluhan persampahan di Kelurahan bersama unit kerja lain pada acara-acara dinas. Alasan kecocokan akan tugas dan kemampuannya dalam bidang tersebut menjadikan petugas menikmati pekerjaannya dan merasa bahwa keterlibatan masyarakat pada program pengelolaan sampah turut mendukung tugas-tugas yang harus diembannya setiap hari. Seringnya petugas melibatkan masyarakat tentu saja secara tidak langsung akan memberi kontribusi yang besar pada Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam mewujudkan **KENDAL BERIBADAT** sebagaimana slogan yang melekat pada daerah ini. Secara tidak langsung pula masyarakat terpacu untuk membiasakan diri mengelola sampah yang telah dihasilkan agar tidak

menimbulkan musibah pada musim penghujan dan menjauhkan dari serangan wabah penyakit.

Sedangkan petugas yang 5 % jarang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah mereka yang merasa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kemampuannya ataupun pendidikannya, sehingga mereka enggan atau terpaksa dengan pekerjaan tersebut. Kondisi ini mempunyai kecenderungan bahwa aparat/pegawai yang tidak menikmati pekerjaannya di samping tidak sesuai dengan kemampuan dan pendidikannya, juga disebabkan pekerjaan tersebut tidak banyak mendatangkan materi/uang sehingga mereka malas untuk mengajak masyarakat turut serta dalam kegiatan persampahan.

Adanya beberapa perbedaan kemampuan petugas dalam pelaksanaan program penanganan sampah menyebabkan timbulnya konflik baik dalam lingkup instansi sendiri dengan instansi lain yang berkaitan maupun dengan masyarakat.

Adapun guna melihat mengenai tingkat keserangan munculnya konflik dalam penanganan sampah pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.5 sebagai berikut :

Tabel IV.5
Tingkat Konflik Dalam Penanganan Sampah

Keterangan	Frekuensi	Persen
Sangat Sering	20	50,0
Sering	12	30,0
Cukup Sering	4	10,0
Jarang	4	10,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.7.

Tabel IV.5 di atas menunjukkan bahwa 50 % responden pada penelitian ini sangat sering terjadi konflik dalam usaha penanganan sampah. Hal ini menjadi perhatian pimpinan KTKP bahwa dalam usaha mewujudkan daerah yang bersih dari sampah memerlukan keterlibatan semua pihak baik dari sisi Pemerintah Daerah maupun masyarakat penghasil sampah. Konflik yang sangat sering muncul tidak saja terjadi antar aparat dalam KTKP tetapi terjadi pula antara aparat dengan masyarakat. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa memberikan pemahaman akan kebutuhan penegakan tata tertib kebersihan kepada masyarakat sangat sulit, apalagi mereka yang berdagang tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku ataupun menyerukan kepada masyarakat pedesaan yang terbiasa membuang sampah di sungai agar membiasakan diri mengumpulkan sampah pada penampungan sementara sempat membuat para petugas putus asa. Kebiasaan-kebiasaan hidup untuk membuang sampah sembarangan menjadikan petugas tanggap untuk sering mengadakan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai konflik yang sering terjadi.

Sedangkan 10 % dari responden menyatakan jarang terjadi konflik dalam penanganan sampah, disebabkan oleh ketidakpeduliannya pada berbagai kesulitan dalam pelaksanaan program persampahan. Hal ini karena petugas tidak mau terjadi keributan dalam masyarakat tersebut dan tidak ingin dianggap sebagai orang yang suka mencari gara-gara hanya soal sampah. Akhirnya apapun yang terjadi dengan ketidakpeduliannya itu sering kali petugas mendapat teguran dari atasan yang dianggap tidak dapat berfungsi sebagai aparat yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam persampahan.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi sebenarnya ditujukan untuk mencapai sasaran dari program penanganan sampah.

Selanjutnya untuk melihat pandangan terhadap program penanganan sampah pada penelitian ini dapat di lihat pada Tabel IV.6 dibawah ini :

Tabel IV.6
Pandangan Terhadap Pencapaian Sasaran Program

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Baik	2	5,0
Cukup Baik	8	20,0
Baik	22	55,0
Sangat Baik	8	20,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.10.

Tabel IV.6 di atas menunjukkan bahwa 55 % responden menyatakan tingkat pencapaian sasaran program baik, artinya sebagian dari rencana program penanganan sampah yang dibuat telah dijalankan dengan sasaran sebagaimana yang diharapkan. Pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari hasil yang telah ditunjukkan dalam laporan kegiatan operasional pengangkutan sampah setiap bulan dari TPS ke TPA dan hasil sampah yang dihasilkan setiap harinya dari berbagai wilayah penghasil sampah di Kabupaten Kendal.

Sementara itu 5 % responden yang menyatakan kurang baik terhadap pencapaian sasaran program kurang baik, disebabkan oleh ketidak mengertian mereka pada program penanganan sampah secara keseluruhan di Kabupaten Kendal bukan sebatas wilayah penghasil sampah di tempat/lingkungan tugasnya saja. Hal ini karena tingkat pendidikan petugas yang mungkin sebatas SD dan SMP sehingga tidak dapat mengetahui secara pasti tata cara mengukur keberhasilan pencapaian program persampahan secara menyeluruh. Baginya setiap usai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya adalah selesai pula

program untuknya, tidak peduli dengan yang lain. Hal inilah yang menjadi penyebab mereka menilai pencapaian sasaran program persampahan masih jauh dari harapan, sedangkan dalam program ini selalu diharapkan efektivitas yang selalu ditingkatkan dalam mengatasi penanganan sampah.

2. Komunikasi Program Penanganan Sampah

Salah satu indikator variabel komunikasi program penanganan sampah adalah kemampuan aparat dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel IV.7 mengenai hasil penelitian tentang kemampuan mengartikan perintah atasan dalam tugas-tugas sehari-hari sebagai berikut :

Tabel IV.7
Tingkat Kemampuan Dalam Menerjemahkan Perintah

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Baik	4	10,0
Cukup Baik	6	15,0
Baik	16	40,0
Sangat Baik	14	35,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.12.

Dari penelitian ini menunjukkan 40 % responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan aparat dalam menterjemahkan perintah dari atasan baik. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas staf terhadap pimpinan yang tinggi, artinya mereka berusaha sedapat mungkin dapat merespon apa yang diinginkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tulisan dalam disposisi yang harus dijalankan pada waktunya. Kemampuan menjabarkan makna perintah ini sangat penting bagi

aparatur dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti program kerja tahunan, rencana kerja triwulan dan lain-lain. Kaitannya dengan pelaksanaan program persampahan ini keberhasilan pimpinan dalam penyelesaian tugas-tugas di bidang pengelolaan sampah dapat dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaan para petugas yang dilandasi rasa tanggung jawab yang besar. Sedangkan 10 % responden yang menyatakan kurang baik dalam menterjemahkan perintah atasan adalah mereka yang baru saja bertugas sebagai tenaga-tenaga lapangan yang direkrut sebagai karyawan KTKP dan belum memahami tugas-tugas yang dibebankan oleh pimpinannya, serta umumnya mereka merasa bahwa tugas tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

Pemahaman akan maksud perintah pimpinan kepada staf ditentukan oleh berbagai faktor yang salah satu diantaranya adalah kebiasaan menjalin komunikasi yang baik.

Untuk melihat hasil penelitian mengenai keharmonisan komunikasi antara pimpinan dengan bawahan yang dilakukan pada KTKP dapat dilihat pada Tabel IV.8 sebagai berikut :

Tabel IV.8.
Tingkat Hubungan dengan Pimpinan Kerja

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Baik	2	5,0
Cukup Baik	4	10,0
Baik	12	30,0
Sangat Baik	22	55,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.15.

Dari Tabel IV.8 di atas, dapat dilihat 55 % responden menyatakan bahwa hubungan yang dijalin dalam instansi itu sangat baik, artinya baik secara formal maupun non formal hubungan antar pimpinan dan bawahan senantiasa berjalan harmonis, sekalipun terjadi konflik dalam proses pelaksanaan tugas-tugas di dalam instansi, namun selalu dapat diatasi dengan mengambil tindakan yang paling kecil resikonya. Dengan demikian tidak banyak terjadi kesulitan dalam penyampaian program persampahan. Saling pengertian dan dilandasi kepercayaan sesama aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi menyebabkan jalinan hubungan kerja menjadi lebih baik serta menghormati apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing antara bawahan dengan atasan merupakan modal yang sangat kuat bagi kesatuan langkah menuju sasaran program yang telah ditentukan. Bagi 5 % responden yang menyatakan kurang baik adalah mereka yang mungkin karena faktor ketidakcocokan dengan sesama aparat dalam penyelesaian tugas-tugas di KTKP. Atau kemungkinan mereka merasa bahwa tugas/pekerjaan di KTKP ini tidak sesuai dengan keahliannya sehingga dirinya merasa komunikasi yang dilakukan terasa tidak ada gunanya karena dianggap tidak menguntungkan dirinya.

Hubungan yang harmonis dalam KTKP akan menunjang keberhasilan pelaksanaan program penanganan sampah, ini dapat diketahui dari adanya komunikasi timbal balik dari kedua unsur yaitu pimpinan dan staf secara terbuka.

Kemudian untuk mengetahui sejauh mana jalinan keterbukaan dalam instansi ini dapat dilihat pada Tabel IV.9 berikut ini.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Tabel IV.9
Tingkat Keterbukaan dalam Penyampaian Pendapat

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Baik	2	5,0
Cukup Baik	8	20,0
Baik	22	55,0
Sangat Baik	8	20,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.18.

Tabel IV.9 di atas menunjukkan bahwa 55 % responden mengakui bahwa pimpinan mereka cukup demokratis, terbukti dari perolehan angka yang di dapat dalam penelitian ini. Latar belakang seorang pimpinan yang dalam karirnya mengawali dari bawah (staf) tentu saja sangat berpengaruh pada perjalanan karirnya mencapai puncak pimpinan. Mengetahui benar keinginan dan harapan staf, tentu membuat pimpinan lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai macam tingkah laku staf. Keterbukaan yang diterapkan akan membuka peluang staf untuk lebih dekat kepada pimpinan sehingga apapun permasalahan yang menyangkut penyelesaian program penanganan sampah (khususnya) dapat diselesaikan secara baik tanpa perasaan sungkan atau ada penghalang di sekitarnya. Dengan demikian setiap kali pimpinan menyampaikan pendapat akan direspon oleh seluruh staf meski dalam tingkat-tingkat tertentu isi informasi itu ditujukan.

Bagi responden yang 5 % menyatakan kurang baik, mungkin disebabkan oleh keterbatasan ruang gerak staf dalam berhubungan dengan pimpinan atau karena penilaian pribadi seseorang yang merasa bahwa dirinya tidak pernah berarti bagi pimpinannya dalam pelaksanaan kegiatan instansi ataupun karena merasa pimpinan tidak pernah dan tidak perlu berhubungan dengan dirinya. Oleh

sebab itu dalam setiap penyampaian pendapat oleh pimpinan, dirinya merasa tidak berkewajiban untuk menilai apakah pimpinan itu benar-benar berarti bagi dirinya.

Sebagai umpan balik dari keterbukaan pimpinan dalam berpendapat, berikut ini akan ditampilkan tabel tentang hasil komunikasi yang terjadi antara bawahan dengan pimpinan sebagai berikut :

Tabel IV.10
Tingkat Pelibatan Pegawai dalam Pembuatan Keputusan

Keterangan	Frekuensi	Persen
Jarang	2	5,0
Cukup Sering	6	15,0
Sering	16	40,0
Sangat Sering	16	40,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.20.

Dari Tabel IV.10 di atas, menunjukkan bahwa 40 % responden menyatakan sangat sering dan sering diajak berdiskusi akan sesuatu yang menentukan kebijakan dari pimpinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumbang saran dan koreksi yang ditujukan kepada pimpinan menunjukkan bahwa atensi bawahan sangat diperhatikan oleh pimpinan sehingga untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan suatu program, pimpinan tidak merasa bekerja sendiri dan hasil yang diperoleh untuk memutuskan sesuatu adalah merupakan keputusan yang terbaik setelah mendapat pertimbangan dari staf. Sedangkan responden yang menyatakan jarang mendapatkan kesempatan terlibat dalam kegiatan pimpinan (5 %) biasanya adalah mereka yang mungkin karena span of control yang jauh atau memang tidak pernah terlibat dengan kegiatan

pimpinan secara umum. Barangkali staf ini sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya.

3. Kualitas Aparatur Pelaksana

Dari sekian banyak indikator kualitas aparatur pelaksana adalah tingkat pendidikan formal pegawai dan berbagai pelatihan yang diikuti. Hal ini dapat dilihat dari Tabel IV.11 mengenai hasil penelitian tentang perlunya dukungan pendidikan dan pelatihan dalam penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

Tabel IV.11
Frekuensi Pengiriman Pegawai Pada Kursus/Pelatihan

Keterangan	Frekuensi	Persen
< 2 kali/setahun	2	5,0
2-4 kali/setahun	10	25,0
5-6 kali/setahun	16	40,0
> 6 kali /setahun	12	30,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.23.

Tabel IV.11 di atas menunjukkan bahwa 40 % responden menyatakan perlunya aparatur pelaksana menambah pengalaman dan wawasan pengetahuan tentang persampahan yang dilakukan beberapa kali dalam setahun. Hal ini dimaksudkan agar pengetahuan akan tata cara pengelolaan sampah yang benar dapat dilakukan di Kabupaten Kendal meski dalam keadaan yang sangat terbatas. Begitu juga dengan pengelolaan sampah yang dilakukan di tempat pembuangan akhir baik secara kimiawi maupun pengaturan secara alami dengan berbagai sarana pelengkap agar tidak merusak ekosistem alam. Peningkatan pengetahuan juga diberikan kepada aparat yang menangani tugas-tugas administratif yang

mendukung kelangsungan program penanganan sampah. Semakin sering aparat yang diikuti sertakan dalam berbagai pelatihan akan menambah nilai pengetahuan di samping pendidikan formal yang dimiliki seorang aparat, sehingga turut mempermudah instansi ini dalam melaksanakan program persampahan yang memang membutuhkan tenaga-tenaga trampil yang berpengalaman dalam mengatasi penumpukan sampah yang dihasilkan oleh penghasil sampah. Sedangkan 5 % responden yang menyatakan frekuensi pengiriman pegawai mengikuti pelatihan kecil atau kurang dari 2 kali setahun, umumnya mereka yang memang kecil kemungkinannya mendapat kesempatan mengikuti pelatihan. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan formal yang dimiliki hanya sebatas SD atau SMP saja.

Kemauan petugas mengikuti pelatihan atau kursus-kursus ketrampilan akan menambah pengetahuan yang mereka miliki sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dalam program penanganan sampah.

Selanjutnya guna mengetahui tingkat kesesuaian program dengan pelaksanaannya dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.12 sebagai berikut :

Tabel IV.12
Tingkat Kesesuaian Program dengan Pelaksanaan

Keterangan	Frekuensi	Persen
Cukup Baik	4	10,0
Baik	22	55,0
Sangat Baik	14	35,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.26.

Tabel IV.12 di atas menunjukkan bahwa 55 % responden menyatakan bahwa pada umumnya yang artinya program persampahan yang direncanakan setiap tahun anggaran sudah sesuai dengan pelaksanaannya yang dapat dilihat pada evaluasi kegiatan setiap tahun anggaran dalam laporan hasil kegiatan organisasi. Hal yang demikian terjadi karena kontrol yang ketat dari pimpinan KTKP dalam pelaksanaan program penanganan sampah untuk menghindari kemungkinan terburuk bila penanganan sampah tidak dikendalikan dengan baik. Belum lagi dengan adanya penghasil sampah yang sulit untuk dikendalikan jumlahnya karena keterbatasan tempat penampungan sementara yang disediakan sedangkan dana pemerintah untuk penyediaan sarana penampung sampah sangat terbatas. Oleh karenanya penanganan sampah sehari-hari menjadi hal yang terus dilakukan dalam proses pemindahan dari tempat penghasil ke tempat penampungan sementara dan dari penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir.

Sedangkan 10 % responden yang menyatakan cukup baik menandakan bahwa kesesuaian program dengan pelaksanaan hanya mampu terbaca oleh para petugas yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah, sehingga mereka yang hanya bertugas sebagai tenaga kasar pada proses pengangkutan sampah memandang bahwa antara program dan pelaksanaannya cukup baik.

Kesesuaian program dengan pelaksanaan menunjukkan ketaatan aparat pada peraturan dalam praktek penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah mendukung tercapainya tujuan program penanganan sampah.

Kemudian tabel berikut ini akan menunjukkan tingkat loyalitas pegawai/aparatur terhadap disiplin kerja dalam KTKP sebagai berikut :

Tabel IV.13
Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Peraturan Kerja

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Patuh	2	5,0
Cukup Patuh	10	25,0
Patuh	16	40,0
Sangat Patuh	12	30,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.28.

Dari Tabel IV.13 di atas, menunjukkan bahwa 40 % responden menyatakan patuh terhadap Peraturan Kerja, ini disebabkan oleh penegakan disiplin yang dilakukan mulai dari pimpinan KTKP sendiri hingga bawahannya. Kepatuhan ini ditunjang berbagai faktor teknis antara lain jarak antara rumah dan kantor yang relatif dekat dan jalur transportasi lancar. Bagi 25 % responden yang cukup patuh pada peraturan kerja, hal ini mungkin disebabkan oleh pendidikan dan kepangkatan pegawai yang memiliki golongan tinggi yang memiliki pola pikir relatif menengah ke atas yang cenderung berkreatifitas di luar jam kerja.

Sedangkan yang sangat patuh adalah 30 %, hal ini mungkin disebabkan oleh adanya kader-kader pemerintah tertentu yang benar-benar memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja, terutama mereka kader pemerintah yang telah mengikuti pendidikan S 1 / S 2

Jenjang pendidikan aparat memang turut menentukan kemampuan dalam pelaksanaan tugas, demikian juga dalam hal penerimaan insentif maupun penghargaan. Tidak dipungkiri bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan aparat maka akan semakin banyak kesempatan memperoleh penghargaan karena prestasi yang dicapai, namun demikian tidak tertutup kemungkinan pula bahwa staf yang

berkemampuan biasa-biasa dapat juga berprestasi dengan baik dan mendapatkan penghargaan.

Untuk melihat hasil penelitian mengenai tingkat keseringan penerimaan kompensasi/bonus ataupun penghargaan terhadap prestasi yang pernah dilakukan aparat dapat dilihat Tabel IV. 14 sebagai berikut :

Tabel IV.14
Tingkat Penerimaan Imbalan / Bonus

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Baik	8	20,0
Cukup Baik	6	15,0
Baik	22	55,0
Sangat Baik	4	10,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.30.

Tabel di atas menunjukkan bahwa 55 % responden menyatakan baik dalam penerimaan imbalan atau penghargaan yang diberikan oleh pimpinan instansi. Hal ini akan berpengaruh pada hasil pekerjaan yang dilakukan yang dinilai pimpinan. Penerimaan imbalan ini didasarkan pada keaktifan aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan sesuai jadwal yang dibuat dengan kontrol yang ketat, sehingga hasilnya selalu dapat di lihat dan imbalannya disesuaikan dengan pekerjaannya. Sedangkan 20 % yang menyatakan kurang baik dalam menerima imbalan dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan, adalah mereka yang tidak pernah merasa puas dari apa yang di dapat. Kecuali itu mungkin mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori berpendapatan rendah sedangkan untuk menutup kehidupan keluarganya sangat bergantung pada hasil pekerjaan menangani sampah. Kelompok ini selalu merasa imbalan yang

diterimanya selalu kurang dan tidak imbang dengan tenaga yang dikeluarkannya dalam menangani sampah.

4. Koordinasi Program Penanganan Sampah

Pada variabel koordinasi program penanganan sampah ini salah satu indikatornya ditunjukkan melalui hubungan kerja masing-masing aparat dalam tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel IV.15
Tingkat Kelancaran dalam Hubungan Kerja

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Lancar	2	5,0
Cukup Lancar	6	15,0
Lancar	24	60,0
Sangat Lancar	8	20,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.34.

Kelancaran hubungan kerja di lingkungan KTKP menunjukkan 60 % menyatakan lancar yang berarti bahwa dalam berkomunikasi antar aparat berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti. Kesadaran yang dimiliki aparat ini sangat menunjang keberhasilan program penanganan sampah, sehingga pimpinan tidak kesulitan dalam mendelegasikan tugas-tugas pada bawahannya. Sedangkan 20 % responden yang menyatakan sangat lancar tentu saja adalah mereka para kepala seksi atau manejer tengah yang memang dituntut mampu menjalin kerja sama demi penyelesaian tugas-tugas yang menjadi beban tanggung jawabnya. Sedangkan 5 % responden yang menyatakan kurang lancar disebabkan oleh lintas pekerjaan yang diberikan kepadanya memang tidak pernah bersentuhan dengan bidang lain di luar

tanggung jawabnya seperti tugas monitor angkutan sampah pasar Kaliwungu dengan Weleri sehingga diantara mereka tidak pernah terjalin hubungan yang akrab kecuali pertemuan pada Hari Raya Idul Fitri misalnya.

Koordinasi yang dilakukan oleh aparat KTKP dalam pelaksanaan program penanganan sampah dengan pihak-pihak terkait banyak membantu mewujudkan keinginan menciptakan lingkungan yang bersih. Koordinasi ini juga dapat membantu menyelesaikan konflik yang muncul diantara petugas penyuluh dengan instansi lain.

Tabel berikut akan menunjukkan seberapa jauh tingkat penyelesaian masalah oleh aparat KTKP dalam pelaksanaan program penanganan sampah.

Tabel IV.16

Tingkat Penyelesaian Masalah Dalam Melaksanakan Koordinasi

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Baik	2	5,0
Cukup Baik	4	10,0
Baik	22	55,0
Sangat Baik	12	30,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.35.

Tabel IV.16 di atas menunjukkan bahwa 55 % responden menyatakan selama ini konflik yang muncul dalam setiap masalah pada setiap koordinasi dilaksanakan dapat diselesaikan dengan baik. Faktor sumber daya manusia yang mayoritas SLTA dan mempunyai jam kerja cukup mungkin merupakan pendukung tingkat kedewasaan dalam berkomunikasi secara terbuka sebagaimana di teladani oleh pimpinan. Sedangkan 30 % responden yang menyatakan sangat baik tentu saja mereka yang duduk dalam jabatan struktural atau koordinator di lapangan

yang selalu dituntut lebih seksama dalam penyelesaian masalah kaitannya dengan penanganan sampah, sedangkan 5% responden yang menyatakan kurang baik disebabkan oleh kemungkinan ketidak mengertiannya pada masalah yang sedang dalam penyelesaian.

Penyelesaian masalah secara cepat dan tepat oleh aparat KTKP membuktikan bahwa koordinasi yang dilakukan benar-benar tepat pada waktunya atau sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat dihindari konflik yang berkepanjangan.

Guna melihat seberapa sering frekuensi pelaksanaan koordinasi untuk menyelesaikan masalah dapat dilihat dalam Tabel IV.17 sebagai berikut :

Tabel IV.17
Frekuensi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Program

Keterangan	Frekuensi	Persen
< 2 kali	2	5,0
2-4 kali	2	5,0
5-6 kali	26	65,0
> 6 kali	10	25,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.36.

Tabel di atas dapat memberi informasi bahwa 65% responden menyatakan frekuensi koordinasi 5-6 kali dilakukan oleh aparat dalam pelaksanaan program penanganan sampah. Pelaksanaan program ini juga melibatkan instansi-instansi terkait yang meranjang suksesnya perwujudan/pencapaian Kendal Beribadat di seluruh Kabupaten Kendal. Oleh karenanya koordinasi yang dilakukan dengan instansi lainpun perlu setiap kali dilakukan dengan cara-cara yang mampu mengarah pada pelaksanaan program yang efektif

dan efisien. Namun demikian terdapat 5 % responden yang menyatakan kurang dari dua kali atau koordinasi hanya 2–4 kali dalam setahun dilakukan KTKP. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan faktor ketidak tahuan beberapa orang yang memang tidak diberi tugas berkoordinasi dengan pihak lain. Karena berkoordinasi dengan unit lain perlu cara tersendiri agar pelaksanaan program berjalan dengan baik tanpa unsur curiga baik dari sisi pendanaan maupun program itu sendiri.

Keaktifan dalam berkoordinasi dengan instansi atau unit kerja lain mendorong unit kerja lain berpartisipasi mensukseskan program penanganan sampah. Hal itu nampak pada respon unit kerja lain setiap kali mendapatkan informasi ikut serta dalam kegiatan penyuluhan penanganan sampah ataupun kegiatan lain yang menyangkut program penanganan sampah.

Selanjutnya dapat dilihat dalam Tabel IV.18 berikut tentang tanggapan unit kerja lain terhadap penanganan sampah :

Tabel IV.18
Tanggapan Unit Kerja Terhadap Penanganan Sampah

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Baik	2	5,0
Cukup Baik	4	10,0
Baik	18	45,0
Sangat Baik	16	40,0
Jumlah	40	100,0

Sumber : Pertanyaan No.38.

Dari Tabel IV.18 di atas menunjukkan 45 % responden memiliki jawaban baik tentang penilaian instansi lain terhadap penanganan sampah. Keadaan ini ditunjang oleh cara-cara aparat KTKP dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam program penanganan sampah, sehingga program ini dapat

terlaksana sesuai dengan rencana. Kemampuan menjalin hubungan dengan seksi lain dalam KTKP dan pihak-pihak lain di luar instansi berpengaruh pula pada hasil dari program penanganan sampah seperti lancarnya sanitasi lingkungan, jaulnya wabah penyakit dan berbagai jenis tumpukan sampah, dan terjadi pengomposan pada lahan pembuangan sampah akhir yang bermanfaat bagi kesuburan tanah.

Sedangkan 5 % responden yang menyatakan kurang baik, tentu saja mempunyai sebab yang mungkin tidak pernah mengetahui bahwa kelangsungan pelaksanaan program penanganan sampah memerlukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait sehingga bagaimana tanggapan mereka akan penanganan sampah tidak dapat mereka ketahui.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Guna mengetahui validitas dari pertanyaan-pertanyaan yang merupakan indikator variabel efektifitas pelaksanaan program, maka dapat dilihat dari corrected item total correlation harus lebih besar dari harga korelasi (harga tabel). Harga tabel korelasi untuk $n = 40$ signifikansi 95 % adalah 0,1149 (Singgih, 2000 : 390). Hasilnya apabila dilihat dalam lampiran, maka semua item pertanyaan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, sementara untuk melihat uji reliabilitas, maka dapat dilihat dari alpha if item deleted, dimana koefisiennya harus lebih besar dari nilai alpha atau 0,7778. Apabila dilihat dari masing-masing variabel dapat disimpulkan bahwa item atau pertanyaan dari variabel efektifitas program, komunikasi program. Kualitas aparatur pelaksana

dan koordinasi program dapat dikatakan reliabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

2. Kategorisasi Variabel Penelitian

a. Variabel Efektifitas Pelaksanaan Program

Variabel efektifitas pelaksanaan program dihitung melalui 10 indikator pertanyaan dimana setelah melalui proses analisis dengan kategorisasi yang digunakan yaitu urutan kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik, diperoleh data total score dapat dilihat pada lampiran.

Tabel IV.19

Kategorisasi Efektifitas Pelaksanaan Program

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Baik	8	20,0
Cukup Baik	7	17,5
Baik	12	30,0
Sangat Baik	13	32,5
Jumlah	40	100,0

Dari tabel IV.19 di atas, menunjukkan bahwa tingkat efektifitas program penanganan sampah di Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal mempunyai kecenderungan sangat baik, hal ini ditunjukkan oleh 32,5 % responden yang menyatakan bahwa efektifitas pelaksanaan program penanganan sampah sangat baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh konsistensi aparat pelaksana kebijakan penanganan sampah dalam melaksanakan kegiatan penanganan sampah.

b. Komunikasi Program

Variabel komunikasi program dihitung melalui 10 indikator pertanyaan yang setelah melalui proses analisis dengan menggunakan kategorisasi 4 yaitu dari urutan kurang baik sampai dengan sangat baik diperoleh data total score sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Tabel IV.20
Kategorisasi Komunikasi Program

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Baik	4	10,0
Cukup Baik	6	15,0
Baik	16	40,0
Sangat Baik	14	35,0
Jumlah	40	100,0

Dari tabel IV.20 di atas, menunjukkan bahwa tingkat komunikasi di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal mempunyai kecenderungan baik, hal ini ditunjukkan oleh 40 % responden yang menyatakan bahwa komunikasi tersebut baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh perhatian dan tanggap dari aparatur pelaksana dalam menjabarkan program-program sampah yang menuntut kecepatan penanganannya sehingga distribusi informasi yang cepat dalam penyelesaian pelayanan kebersihan lingkungan mengatasi akumulasi sampah sangat diperlukan.

c. Kualitas Aparatur Pelaksana

Variabel kualitas aparatur pelaksana dihitung melalui 10 indikator pertanyaan dimana setelah melalui proses analisis dengan menggunakan

kategorisasi 4 mulai dari urutan kurang baik sampai dengan sangat baik diperoleh data total score dalam lampiran.

Tabel IV.21
Kategorisasi Kualitas Aparatur Pelaksana

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Baik	4	10,0
Cukup Baik	10	25,0
Baik	18	45,0
Sangat Baik	8	20,0
Jumlah	40	100,0

Dari tabel IV.21 di atas, menunjukkan bahwa tingkat kualitas aparatur pelaksana di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal mempunyai kecenderungan baik, yang ditunjukkan oleh 45 % responden yang menyatakan bahwa kualitas aparatur pelaksana tersebut baik. Hal ini mungkin karena mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dibutuhkan masyarakat akan pengangkutan sampah dan pengelolannya dapat terpenuhi.

d. Koordinasi Program

Variabel koordinasi program dihitung melalui 10 indikator pertanyaan dimana setelah melalui proses analisis dengan menggunakan kategorisasi 4 mulai dari urutan kurang baik sampai dengan sangat baik diperoleh data total score sebagaimana dalam lampiran.

Tabel IV.22
Kategorisasi Koordinasi Program

Keterangan	Frekuensi	Persen
Kurang Baik	6	15,0
Cukup Baik	14	35,0
Baik	10	25,0
Sangat Baik	10	25,0
Jumlah	40	100,0

Dari tabel IV.22 di atas, menunjukkan bahwa tingkat koordinasi di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal memiliki kecenderungan cukup baik, hal ini ditunjukkan oleh 35 % responden yang menyatakan bahwa koordinasi tersebut cukup baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit/seksi yang menjadi tanggung jawabnya lebih diutamakan sehingga untuk pelaksanaan program penanganan sampah yang menjadi tanggung jawab salah satu seksi dalam KTKP kadang-kadang kurang mendapat respon cepat meskipun komunikasi yang dilakukan lancar. Masalah lain yang dihadapi mungkin terbatasnya sarana penunjang dalam operasional penanganan sampah yang menyebabkan hubungan antar pengelola program penanganan sampah dengan unit lain menjadi terhambat meskipun pada akhirnya penyelesaian pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

3. Uji Hipotesis

a. Hubungan Komunikasi dengan Efektifitas Program

Untuk melihat hasil penelitian mengenai hubungan antara variabel komunikasi dengan variabel efektifitas program dapat dilihat pada tabel IV.23 sebagai berikut :

Tabel IV.23
Hubungan Komunikasi dengan Efektifitas Program

Efektifitas Pelaksanaan Program	Komunikasi				Total
	Kurang baik	Cukup baik	Baik	Sangat Baik	
Kurang baik	2 (50,0 %)	4 (66,7 %)	-	2 (14,3 %)	8 (20,0 %)
Cukup baik	-	-	5 (31,3 %)	2 (14,3 %)	7 (17,5 %)
Baik	-	2 (33,3 %)	5 (31,3 %)	5 (35,72 %)	12 (30,0 %)
Sangat baik	2 (50,0 %)	-	6 (37,5 %)	5 (35,7 %)	13 (32,5 %)
Total	4 (100,0 %)	6 (100,0 %)	16 (100,0 %)	14 (100,0 %)	40 (100,0 %)

Dari tabel IV.23 di atas, terlihat bahwa komunikasi yang tepat akan membuahkan hasil pada efektifitas pelaksanaan program yang baik pula. Hal ini terlihat dari 14 responden yang menyatakan komunikasi sangat baik, 5 diantaranya menyatakan efektifitas pelaksanaan programnya sangat baik. Sedangkan dari 4 responden yang menyatakan komunikasi kurang baik 2 diantaranya menyatakan efektifitas kerjanya juga tidak baik. Dari 14 responden yang menyatakan komunikasinya sangat baik ternyata 2 diantaranya menyatakan efektifitas pelaksanaan program kurang baik. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kebiasaan para petugas pelaksana yang meremehkan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya namun tidak pernah diselesaikan.

Tabel IV.24
Hubungan Komunikasi dengan Efektifitas Pelaksanaan Program

		Value	Asymp std error	Approx .T.	Approx .sig.
Ordinal by ordinal	Kendall's tau- b	,406	,153	2,338	,004
N of valid cases		40			

Berdasarkan tabel IV.24, hasil perhitungan komputer (SPSS PC +) di atas, menunjukkan bahwa hubungan antara efektivitas pelaksanaan program dengan komunikasi mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,044 kemudian hasil perhitungan tersebut dikonfirmasi dengan penggunaan tabel z skor guna menentukan tingkat signifikansi yaitu sebagai berikut :

$$Z = \frac{T}{\sqrt{\frac{2(2N + 1)}{9N(N - 1)}}$$

$$Z = \frac{0,406}{\sqrt{\frac{2(2.40 + 1)}{9.40(40 - 1)}}$$

$$Z = \frac{0,406}{\sqrt{\frac{162}{14040}}}$$

$$Z = \frac{0,406}{\sqrt{0,0115}}$$

$$Z = \frac{0,406}{0,1074}$$

$$Z = 3,78$$

Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa nilai z hitung lebih besar dari nilai tabel z pada taraf kesalahan 5 % (1,96), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara variabel komunikasi program dengan variabel efektivitas pelaksanaan program dapat diterima.

b. Hubungan Kualitas Aparatur Pelaksana dengan Efektifitas Pelaksanaan Program.

Untuk melihat hasil penelitian mengenai hubungan antara variable kualitas aparatur pelaksana dengan variabel efektifitas pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel IV.25 sebagai berikut :

Tabel IV.25
Hubungan Kualitas Aparatur Pelaksana dengan Efektifitas Pelaksanaan Program

Efektifitas Pelaksanaan Program	Kualitas Aparatur				Total
	Kurang baik	Cukup baik	Baik	Sangat Baik	
Kurang baik	4 (100,0 %)	-	4 (22,2 %)	-	8 (20,0 %)
Cukup baik	-	2 (20,0 %)	5 (27,8 %)	-	7 (17,5 %)
Baik	-	3 (30,0 %)	5 (27,8 %)	4 (50,0 %)	12 (30,0 %)
Sangat baik	-	5 (50,0 %)	4 (22,2 %)	4 (50,0 %)	13 (32,5 %)
Total	4 (100,0 %)	10 (100,0 %)	18 (100,0 %)	8 (100,0 %)	40 (100,0 %)

Dari tabel IV.25 di atas, terlihat bahwa dari 8 responden yang menyatakan kualitas aparatur pelaksana sangat baik sebanyak 4 responden dan 4 responden lainnya menyatakan efektifitas pelaksanaan program baik. Hal ini menunjukkan bahwa bila kualitas aparatur yang baik sangat menunjang terlaksananya pelaksanaan program penanganan sampah, ini dimungkinkan karena setiap pelaksana memiliki pengalaman yang cukup dalam kegiatan penanganan sampah yang pernah dilakukannya ditambah dengan pengetahuan yang didapat dari hasil keikutsertaannya mengikuti pelatihan-pelatihan dalam dinas.

Bagi 4 responden yang menyatakan kualitas aparatur kurang baik menyatakan efektivitas pelaksanaan program juga kurang baik. Tentu saja hal ini jelas disebabkan oleh rendahnya mutu SDM yang mengakibatkan ketidak tahuan maksud dari program penanganan sampah. SDM yang demikian umumnya adalah tenaga-tenaga musiman yang direkrut oleh KTKP sebatas kebutuhan tertentu saja.

Tabel IV.26
Hubungan Kualitas Aparatur Pelaksana dengan
Efektivitas Pelaksanaan Program

		Value	Asymp std error	Approx .T.	Approx .sig.
Ordinal by ordinal	Kendall's tau- b	,442	,137	2,714	,036
N of valid cases		40			

Berdasarkan tabel IV.26, hasil perhitungan komputer (SPSS PC +) di atas menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas aparatur pelaksana dengan efektivitas pelaksanaan program mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,442, kemudian hasil perhitungan tersebut dikonfirmasi dengan penggunaan tabel z skor guna menentukan tingkat signifikansi, yaitu sebagai berikut :

$$Z = \frac{T}{\sqrt{\frac{2(2N + 1)}{9N(N - 1)}}$$

$$Z = \frac{0,442}{\sqrt{\frac{2(2.40 + 1)}{9.40(40 - 1)}}$$

$$Z = \frac{0,442}{\sqrt{\frac{162}{14040}}}$$

$$Z = \frac{0,442}{\sqrt{0,0115}}$$

$$Z = \frac{0,442}{0,1074}$$

$$Z = 4,115$$

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa nilai z hitung lebih besar dari nilai tabel z pada taraf signifikansi 5 % (1,96), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikansi antara variabel efektifitas pelaksanaan program dengan variabel kualitas aparatur pelaksana dapat diterima.

c. Hubungan Koordinasi Program dengan Efektifitas Pelaksanaan Program

Untuk melihat hasil penelitian mengenai hubungan antara variabel koordinasi program dengan variabel efektifitas pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel IV.27 sebagai berikut :

Tabel IV.27

Hubungan Koordinasi Program dengan Efektifitas Pelaksanaan Program

Efektifitas Pelaksanaan Program	Koordinasi Program				Total
	Kurang baik	Cukup baik	Baik	Sangat Baik	
Kurang baik	2 (33,3 %)	4 (28,6 %)	2 (20,0 %)	-	8 (20,0 %)
Cukup baik	-	3 (21,4 %)	2 (20,0 %)	2 (20,0 %)	7 (17,5 %)
Baik	-	5 (35,7 %)	3 (30,0 %)	4 (40,0 %)	12 (30,0 %)
Sangat baik	4 (66,7 %)	2 (14,3 %)	3 (30,0 %)	4 (40,0 %)	13 (32,5 %)
Total	6 (100,0 %)	14 (100,0 %)	10 (100,0 %)	10 (100,0 %)	40 (100,0 %)

Dari tabel IV.27 di atas, terlihat bahwa dari 10 responden yang menyatakan koordinasi program sangat tinggi ternyata yang menyatakan efektifitas pelaksanaan program juga sangat tinggi. Ini membuktikan bahwa keberhasilan dalam melakukan koordinasi tentang pelaksanaan program penanganan sampah sangat berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan programnya. Keterlibatan seksi lain dalam program penanganan sampah mulai dari penyusunan program, kerja sama antar seksi maupun unit kerja lain dan pemecahan masalah yang dijumpai di lapangan senantiasa dibina untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan program penanganan sampah. Bagi 2 responden dari 10 responden yang menyatakan bahwa koordinasi program sangat baik tetapi efektifitas pelaksanaan program cukup baik disebabkan oleh adanya segelintir petugas yang kurang aktif berkomunikasi dengan pihak lain sehingga menimbulkan kekurangan serasian penyelesaian pekerjaan di lapangan.

Sedangkan dari 6 responden yang menyatakan koordinasi program kurang baik 2 orang responden menyatakan efektifitas program juga kurang baik, sehingga dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program yang tidak melibatkan unit terkait dalam operasionalnya akan berakibat pada ketimpangan pelaksanaan program itu sendiri, belum lagi dengan masalah yang dihadapi di lapangan yang menyangkut tanggung jawab dari instansi lain bila tidak dikoordinasikan dengan baik, maka dalam pelaksanaannya akan menimbulkan masalah baru.

Tabel IV.28
Hubungan Koordinasi Program dengan
Efektifitas Pelaksanaan Program

		Value	Asymp std error	Approx .T.	Approx .sig.
Ordinal by ordinal	Kendall's tau- b	,381	,145	1,986	,043
N of valid cases		40			

Berdasarkan tabel IV.28 hasil perhitungan komputer (SPSS PC +) di atas, menunjukkan bahwa hubungan variabel koordinasi program dengan efektifitas pelaksanaan program mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,381. Kemudian hasil perhitungan tersebut dikonfirmasi dengan menggunakan tabel z skor guna menentukan tingkat signifikansi yaitu sebagai berikut :

$$Z = \frac{T}{\sqrt{\frac{2(2N + 1)}{9N(N - 1)}}$$

$$Z = \frac{0,381}{\sqrt{\frac{2(2.40 + 1)}{9.40(40 - 1)}}$$

$$Z = \frac{0,381}{\sqrt{\frac{162}{14040}}}$$

$$Z = \frac{0,381}{\sqrt{0,0115}}$$

$$Z = \frac{0,381}{0,1074}$$

$$Z = 3,547$$

Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa nilai z hitung lebih besar dari nilai tabel z pada taraf kesalahan 5 % (1,96), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antar variabel efektivitas pelaksanaan program dengan variabel koordinasi program dapat diterima.

d. Hubungan Komunikasi Kualitas Aparat dan Koordinasi dengan Efektivitas Pelaksanaan Program.

Guna mengetahui apakah ada hubungan secara bersama-sama antara variabel komunikasi, kualitas aparatur dan koordinasi program dengan efektivitas pelaksanaan program penanganan sampah di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal diperlukan koefisien korelasi kendall. Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada tabel IV.29 sebagai berikut :

Tabel IV.29

Hubungan Komunikasi, Kualitas Aparat dan Koordinasi Program dengan Efektivitas Pelaksanaan Program

	Mean Rank
Efektivitas Pelaksanaan Program	2,39
Komunikasi Program	2,83
Kualitas Aparat Pelaksana	2,41
Koordinasi Program	2,38
N	40
Kendall's W	0,380
Chi-Square	41,530
Df	3
Asymp Sig	0,210

A Kendall's Coefisient of Koordinat

Pada tabel IV.29 di atas hasil koefisien koordinat kendall adalah sebesar 0,38 dengan uji signifikansi untuk koordinat dapat dilihat dari koefisien chi-square atau sebesar 4,530 dan harga tabel untuk $df = 3$, tingkat signifikansi 95 % adalah 7,8147 (Singgih, 2000 : 282). Sehingga nilai hitung koefisien koordinat lebih besar dan nilai tabel atau dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel komunikasi program, kualitas aparat pelaksana dan koordinasi program dengan efektifitas pelaksanaan program penanganan sampah di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal. Sedangkan sumbangan dari ketiga variabel komunikasi, kualitas aparat dan koordinasi program dengan efektifitas pelaksanaan program dapat terlihat dari koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan koefisien koordinat Kendall dan hasilnya dikalikan 100 % yaitu sebesar 14,44 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan secara bersama-sama antara variabel komunikasi program, kualitas aparat pelaksana dan koordinasi program dengan efektifitas pelaksanaan program penanganan sampah sebesar 14,44 %, sedangkan 85,56 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya variabel kualitas aparat pelaksana yang berpengaruh terhadap komunikasi dan koordinasi program. Dalam artian bahwa variabel kualitas aparat pelaksana ini sebagai variabel penghubung antara komunikasi program dan koordinasi program dengan efektifitas pelaksanaan program.

C. DISKUSI

Dari berbagai uraian di atas terlihat bahwa terdapat hubungan secara bersama-sama antara variabel efektifitas pelaksanaan penanganan sampah dengan ketiga variabel komunikasi, kualitas aparat pelaksana, dan koordinasi sebesar 0,380.

Selain itu hasil penelitian juga menyatakan bahwa kualitas aparat pelaksana dapat dikatakan sebagai variabel penghubung, hal ini terlihat dari hasil koefisien koordinat yang menunjukkan bahwa apabila variabel komunikasi dan variabel koordinasi dikontrol dengan kualitas aparatur pelaksana terdapat kenaikan, daripada dihubungkan secara langsung antara variabel komunikasi dengan variabel efektifitas pelaksanaan program dan antara variabel koordinasi dengan efektifitas pelaksanaan program. Hal ini jelas bahwa koordinasi yang baik akan tercipta bila ditunjang oleh kualitas aparat pelaksana yang berkemampuan sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan program yang efektif.

Di lain pihak, sesuai pendapat Farland (1981) "bahwa elemen yang menentukan komunikasi berhasil atau tidak adalah proses interaksi saling pengertian satu sama lain antar manusia dalam memahami informasi". Secara tidak langsung Farland juga menjelaskan bahwa komunikasi akan efektif apabila informasi dikomunikasikan oleh aparat pelaksana yang berkualitas atau berkemampuan agar efektifitas pelaksanaan program dapat tercapai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya, khususnya dalam membuktikan ada tidaknya hubungan antara variabel efektifitas pelaksanaan program penanganan sampah dengan variabel komunikasi program, kualitas aparat pelaksana dan koordinasi program, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel komunikasi program dengan variabel efektifitas pelaksanaan program penanganan sampah dengan koefisien korelasi rank kendall's sebesar 0,406 dengan tingkat signifikansi 95 %. Hasil perhitungan diperoleh z hitung sebesar 3,78 sedangkan z tabel sebesar 1,96 sehingga z hitung lebih besar z tabel yang berarti sesuai dengan perumusan dan tujuan penelitian. Dengan demikian hipotesa dapat diterima.
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel efektifitas pelaksanaan program dengan variabel kualitas aparat pelaksana, dengan koefisien rank kendall's sebesar 0,442 dengan tingkat signifikansi 95 %. Dengan demikian hipotesis dapat diterima hasil perhitungan diperoleh z hitung sebesar 4,11 sedangkan z tabel sebesar 1,96 sehingga z hitung lebih besar dari z tabel yang berarti sesuai dengan perumusan dan tujuan penelitian.
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel efektifitas pelaksanaan program dengan variabel koordinasi program dengan koefisien rank kendall's sebesar 0,381 dengan tingkat signifikansi 95 %. Dengan demikian hipotesis dapat diterima dengan alasan hasil perhitungan diperoleh z hitung

sebesar 3,54 sedangkan z tabel sebesar 1,96 sehingga z hitung lebih besar dari z tabel yang berarti sesuai dengan perumusan dan tujuan penelitian.

4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel efektivitas pelaksanaan program penanganan sampah dengan variable-variabel komunikasi program, kualitas aparat pelaksana, dan koordinasi program dengan koefisien koordinat kendall's sebesar 0,380 dengan tingkat kepercayaan 95 %. Dengan demikian hipotesis dapat diterima dengan alasan hasil perhitungan diperoleh koefisien chi-square (X) hitung sebesar 41,530 untuk $df = 3$, sedangkan koefisien chi-square (X) dalam tabel sebesar 7,8147 sehingga x hitung lebih besar dari x tabel yang berarti sesuai dengan perumusan dan tujuan penelitian.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka berikut ini akan disampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program penanganan sampah di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal dengan baik. Untuk lebih jelasnya saran tersebut adalah sebagai berikut

1. Efektivitas Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan program penanganan sampah di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal memiliki kecenderungan baik, sehingga perlu lebih meningkatkan kegiatan dalam :

- a. Pelaksanaan penanganan sampah kepada masyarakat dalam pengelolaan kebersihan mulai dari tingkat RT / RW hingga tempat-tempat penampungan sementara pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Upaya ini termasuk

didalamnya dengan pemeliharaan tempat-tempat penampungan sampah sementara yang seringkali rusak/terlalu penuh oleh sampah yang menyebabkan pemandangan tidak sedap serta mengganggu kesehatan lingkungan. Jadwal pengambilan sampah yang telah ditetapkan hendaknya selalu diperhatikan agar kapasitas penampungan sampah dapat terjaga setiap hari dan volume sampah yang dihasilkan oleh penghasil sampah dapat dikendalikan.

- b. Lebih disiplin dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan termasuk dengan memperhatikan berbagai aspek pendukung pelaksanaan program tersebut baik SDM, sarana prasarana dan biaya yang dibutuhkan. Mengingat program ini berlaku untuk seluruh Kabupaten Kendal, diharapkan pelayanan penanganan sampah tidak hanya meliputi enam daerah yang sudah dipastikan menjadi tujuan utama penanganan sampah ini tetapi lebih diperluas sampai menjangkau daerah-daerah lain yang juga menghasilkan sampah banyak.

2. Komunikasi Program

Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa komunikasi program di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal mempunyai kecenderungan baik, namun masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Menciptakan suasana kerja yang harmonis, santai tapi serius dalam menyampaikan program penanganan sampah agar terjadi hubungan yang lancar, komunikasi dua arah yang seimbang dalam kehidupan instansi.
- b. Lebih terbuka, saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati, bekerja sama dan toleransi yang baik antar pegawai yang selalu dilakukan tidak lepas dari etiket penyampaian informasi dari atasan pada bawahan

ataupun laporan dari bawahan kepada atasan senantiasa dibina agar pengambilan keputusan dapat tepat sesuai yang diharapkan.

3. Kualitas Aparat Pelaksana

Hasil penelitian yang telah diperoleh menunjukkan bahwa kualitas aparat pelaksana di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal mempunyai kecenderungan baik, tetapi perlu ada hal-hal lain yang harus diperhatikan, antara lain sistem pemberian penghargaan yang lebih baik seperti insentif atau bingkisan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Hal lain lagi yang harus diperhatikan adalah peningkatan mutu keterampilan pegawai melalui berbagai pelatihan dan pengembangan SDM pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut tata cara pengelolaan sampah maupun limbah.

4. Koordinasi Program

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh terlihat koordinasi program di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal mempunyai kecenderungan cukup baik, oleh karenanya perlu diperhatikan hal-hal berikut, antara lain :

- a. Meningkatkan kerja sama antar seksi maupun dengan unit dinas terkait dalam pelaksanaan program di lapangan misalnya dengan membuat consensus bersama di lingkungan kerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas penanganan sampah.
- b. Lebih cepat dalam menyelesaikan program secara bersama agar terwujud cita-cita Kendal Beribadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1991, *Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan*, Bumi Sejahtera, Jakarta.
- Arikunto, Sukarsini, 1993, *Pengantar Metodeologi Riset Sosial*, Alunni, Bandung.
- Argyrous, George, 1996, *Statistics for Sosial Research*, Macmilan Education Australia Pty LTD, South Melbourne, Australia.
- Dwiyanto, Agus, 1994, *Evaluasi Program dan Kebijakan Pemerintah*, disampaikan dalam Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial Angkatan II tanggal 4 – 5 Oktober 1994, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Dye, R. Thomas, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall Inc, New York.
- Gouzali Sydam, 1946, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management)*, Terjemahan, Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Grindle, Merilee S (ed), 1980, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Handoko, T. Hari, 1997, *Manajemen*, Edisi 2, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 1992, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ismadi, M, 1997, *Kualitas Berkelanjutan Sebagai Paradigma Penataan Sistem Pendidikan Tinggi*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi dan Sosialisasi KPPT-2P, 1996-2005, UGM
- Juni Prihatin, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Jones, Charles, O, *Introduction in Public Policy*, dalam Nasir Budiman (1991), *Pengantar Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Megginsos, David, 1997, *Human Resources Development (Terjemahan)*, Gramedia, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan Kedelapan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Notoatmodjo, Sukijo, 1992, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bhineka Cipta Jakarta

- Riggs, James L, 1979, *Industrial Organization and Management*, Grolier Incorporated, New York
- Rossi, Peter H dan Freeman, Howard E, 1985, *Evaluation a Systematic Approach*, Sage Publications Inc, California.
- Sabatier, Pane and Daniel Mazmanian, 1983, *Top Down and Bottom Up Approach, Implementation Research*, In Journal Public Policy, Edisi VIII, Hal. 69.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, (ed), 1985, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman, 1985, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi – UI, Jakarta
- Sugandha, Dan, 1988, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Intermedia, Jakarta.
- Stoner, James A.F and Charles Wankel, 1986, *Management*, Third Edition, Prestice – Hall Internasional Inc, Englewood Clifs, New Jersey.
- Steers M. Richard, 1980, *"Efektifitas Organisasi" Kaidah Tingkah Laku (Terjemahan)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 1992, *Kepemimpinan dan Komunikasi*, Modul Program Pelatihan Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan, UGM, Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramuisanto, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.